Kepulauan Seribu
sedang menghadapi beberapa masalah pelik yang
berkaitan langsung dengan keberlanjutannya sebagai
salah satu destinasi bahari utama di Indonesia yaitu
air bersih, permukiman penduduk, pemakaman,
dermaga, dan sampah.
mengacu pada indikator indikator standar pariwisata
berkelanjutan 2019 versi 2.0 dari Global Sustainable
Tourism Council (GSTC), diketahui bahwa
destinasi Kepulauan Seribu secara
umum belum menerapkan standar internasional
pariwisata berkelanjutan
agar Kepulauan Seribu tetap dapat menjadi destinasi
utama wisata bahari kelas dunia yang menjadi salah
satu sektor unggulan di DKI Jakarta, maka Kepulauan
Seribu harus mengubah orientasinya dengan
menerapkan pariwisata berkelanjutan sesuai kriteria
standar dari GSTC yang juga sejalan dengan
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Penerapan Standar Internasional Pariwisata Berkelanjutan di Kepulauan Seribu DKI Jakarta

Dr. T. Herry Rachmatsyah, M.m., M.Si.

Dr. T. Herry Rachmatsyah, M.M., M.Si.

PENERAPAN STANDAR INTERNASIONAL PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA

2020

PENERAPAN STANDAR INTERNASIONAL PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA

T. Herry Rachmatsyah

2020

Penerbit :

Program Pascasarjana
Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

PENERAPAN STANDAR INTERNASIONAL PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA

© Penerbit Program Pascasarjana
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Kampus I, Jalan Hang Lekir I No. 8
Jakarta Pusat 10270

Penulis : Dr. T. Herry Rachmatsyah, M.Si.
Desain Sampul : David

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Program Pascasarjana
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta, 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN : - 9786239460501

Dicetak oleh Penerbit Program Pascasarjana
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Isi diluar tanggung jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dengan mengacu pada laporan hasil penelitian yang berjudul “Penerapan Kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC) di Kepulauan Seribu”. Pada saat penelitian berlangsung (Maret-Mei 2020), Kepulauan Seribu sedang menghadapi beberapa masalah pelik yang berkaitan langsung dengan keberlanjutannya sebagai salah satu destinasi bahari utama di Indonesia yaitu air bersih, permukiman penduduk, pemakaman, dermaga, dan sampah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen yang disusun dengan mengacu pada indikator-indikator standar pariwisata berkelanjutan 2019 versi 2.0 dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC), diketahui bahwa destinasi Kepulauan Seribu secara umum belum menerapkan standar internasional pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu agar Kepulauan Seribu tetap dapat menjadi destinasi utama wisata bahari kelas dunia yang menjadi salah satu sektor unggulan di DKI Jakarta, maka Kepulauan Seribu harus mengubah orientasinya dengan menerapkan pariwisata berkelanjutan sesuai kriteria standar dari GSTC yang juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang besar serta memberikan kontribusi yang tinggi bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan para pemangku kepentingan, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka, dan Kerangka Pemikiran.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Pustaka.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	22
Bab III Metodologi Penelitian.....	24
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
B. Metode Penelitian.....	24
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	25
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	27
E. Uji Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	30
A. Gambaran Umum Kepulauan Seribu.....	30
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan.....	74
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka.....	92
Lampiran 1 Kuesioner.....	95
Lampiran 2 Skor Jawaban Responden.....	110

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2-1 Perbandingan Penelitian Terdahulu..... 10
Tabel 2-2 Indikator Inti WTO Untuk Pariwisata Berkelanjutan..... 18
Tabel 2-3 Contoh Indikator Pelengkap WTO Untuk Pariwisata Berkelanjutan Bagi Lingkungan Terpilih..... 19
Tabel 2-4 Struktur Kriteria..... 22
Tabel 3-1 Waktu Penelitian..... 24
Tabel 3-2 Bagian, Kriteria, dan Indikator..... 25
Tabel 3-3 Jumlah Responden..... 28
Tabel 4-1 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A1..... 41
Tabel 4-2 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A2..... 42
Tabel 4-3 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A3..... 43
Tabel 4-4 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A4..... 44
Tabel 4-5 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A5..... 45
Tabel 4-6 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A6..... 45
Tabel 4-7 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A7..... 47
Tabel 4-8 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A8..... 47
Tabel 4-9 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A9..... 48
Tabel 4-10 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A10.....,..... 49
Tabel 4-11 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A11..... 50
Tabel 4-12 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B1..... 51
Tabel 4-13 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B2..... 52
Tabel 4-14 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B3..... 53
Tabel 4-15 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B4..... 54

Tabel 4-16 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B5..... 54
Tabel 4-17 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B6..... 55
Tabel 4-18 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B7..... 56
Tabel 4-19 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B8..... 57
Tabel 4-20 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C1..... 58
Tabel 4-21 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C2..... 58
Tabel 4-22 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C3..... 59
Tabel 4-23 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C4..... 60
Tabel 4-24 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C5..... 60
Tabel 4-25 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C6..... 61
Tabel 4-26 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C7..... 62
Tabel 4-27 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D1..... 63
Tabel 4-28 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D2..... 64
Tabel 4-29 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D3..... 65
Tabel 4-30 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D4..... 66
Tabel 4-31 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D5..... 67
Tabel 4-32 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D6..... 68
Tabel 4-33 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D7..... 69
Tabel 4-34 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D8..... 70
Tabel 4-35 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D9..... 70
Tabel 4-36 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D10..... 72
Tabel 4-37 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D11..... 73
Tabel 4-38 Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D12..... 74

Tabel 4-39 Pemenuhan Standar Kriteria Manajemen Berkelanjutan..... 74
Tabel 4-40 Pemenuhan Standar Kriteria Keberlanjutan Sosial-Ekonomi..... 77
Tabel 4-41 Pemenuhan Standar Kriteria Keberlanjutan Budaya..... 80
Tabel 4-42 Pemenuhan Standar Kriteria Keberlanjutan Lingkungan..... 81

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2-1 Manajemen Pariwisata Berkelanjutan
Gambar 3-2 Kerangka Pemikiran..... 14
Gambar 4-1 Peta Kepulauan Seribu..... 31
Gambar 4-2 Beragam Aktivitas Wisata di Kepulauan Seribu..... 32
Gambar 4-3 Pulau Bidadari..... 33
Gambar 4-4 Pulau Ayer..... 33
Gambar 4-5 Pulau Alam Kotok..... 34
Gambar 4-6 Pulau Macan..... 35
Gambar 4-7 Pulau Pelangi..... 35
Gambar 4-8 Pulau Putri..... 36
Gambar 4-9 Pulau Sepa..... 36
Gambar 4-10 Pulau Pantara..... 37
Gambar 4-11 Pulau Royal Resort..... 38
Gambar 4-12 Pulau Pari..... 38
Gambar 4-13 Pulau Tidung..... 39
Gambar 4-14 Pulau Pramuka..... 40
Gambar 4-15 Pulau Harapan..... 40
Gambar 4-16 Pulau Payung..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya masyarakat Indonesia lebih mengenal daerah daratan yang ada di Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan), tetapi sebenarnya Jakarta memiliki daerah lautan yang dikenal dengan nama Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu memiliki luas 4.745,62 kilometer persegi yang terdiri dari 8,76 kilometer persegi daratan dan 44.690,85 kilometer persegi lautan dengan jumlah pulau mencapai 110 yang terdiri dari 11 pulau hunian (Payung, Tidung, Lancang, Pari, Untung Jawa, Panggang, Pramuka, Kelapa, Kelapa Dua, Harapan, dan Sebira), 4 pulau cagar budaya yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta (Bidadari, Onrust, Kelor, dan Cipir), 36 pulau resor yang dikelola swasta, dan sisanya pulau tidak berpenghuni.

Sudah sejak lama Kepulauan Seribu dikenal sebagai salah satu tujuan wisata bahari di Jakarta. Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari-November 2019 mencapai 23.408 orang (beritapulauseribu.id, 2019). Jumlah kunjungan tertinggi terjadi di bulan Agustus yang mencapai 4.081 orang sedangkan setiap bulan rata-rata jumlah wisatawan mancanegara berkisar antara 2 sampai 3 ribu orang. Jenis pulau yang dikunjungi didominasi oleh pulau resor dengan angka kunjungan tertinggi yakni Pulau Sepa mencapai 7.743 wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk wisata pulau hunian yakni Pulau Pari mencapai 1.805 orang

dan untuk pulau cagar budaya yakni Pulau Onrust mencapai 128 orang.

Pembangunan pariwisata Kepulauan Seribu dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (antaranews.com, 2019). Aksesibilitas berhubungan dengan sarana dan prasarana transportasi menuju tempat wisata. Amenitas berhubungan dengan fasilitas di luar akomodasi yang dapat digunakan oleh wisatawan selama berwisata, sedangkan atraksi merupakan kegiatan-kegiatan lokal yang bisa dijual kepada wisatawan.

Seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, Kepulauan Seribu juga tidak bebas dari masalah. Terdapat beberapa masalah utama yang terjadi di Kepulauan Seribu (tempo.co, 2012). Masalah pertama adalah ketersediaan air bersih. Jumlah air bersih di sejumlah wilayah masih terbatas dan terkadang ada daerah yang airnya tak bisa digunakan untuk minum karena masih berupa air asin. Persediaan air bersih dan siap minum di Kepulauan Seribu tak sebanding dengan jumlah warga di sana. Dan hal itu diperparah dengan sumur yang kerap mengering pada musim kemarau. Masalah kedua yang perlu menjadi perhatian adalah masalah permukiman di Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Utara. Pulau Pramuka sudah terlalu padat untuk dijadikan tempat tinggal. Sampai-sampai sejumlah penduduk membangun tempat tinggal di atas laut padahal tinggal di atas laut berbahaya ketika gelombang pasang. Masalah ketiga adalah pemakaman. Lahan pemakaman di Kepulauan Seribu sudah terbatas sehingga harga untuk sebuah kuburan sangat mahal. Masalah keempat adalah dermaga. Sejumlah pengelola kapal angkut penumpang mengeluhkan kapasitas Muara Angke yang menjadi tempat labuh. Muara Angke dinilai sudah terlalu padat sehingga kapal penumpang kesulitan menurunkan

atau menaikkan penumpang. Sesungguhnya terdapat Dermaga Kali Adem tetapi masih kurang diberdayakan sebagai tempat labuh kapal penumpang sehingga dermaga tersebut masih sepi. Masalah kelima adalah harga tiket kapal menuju Kepulauan Seribu yang masih tergolong mahal.

Masalah lain yang sangat pelik adalah sampah. Masalah sampah di Kepulauan Seribu mulai disorot oleh para wisatawan dan dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan di Kepulauan Seribu (kompas.id, 2019). Ada 3 jenis sumber sampah di Kepulauan Seribu, yaitu sampah yang berasal dari laut, pulau, dan sampah kiriman dari Jakarta. Dalam sehari, ada 40 ton sampah di wilayah Kepulauan Seribu. Jika dirinci, sampah yang dihasilkan masyarakat Kepulauan Seribu mencapai 17,37 ton sampah. Sementara sampah yang dihasilkan wisatawan 1,6 ton sampah per hari. Sampah kiriman menjadi penyumbang sampah terbanyak di Kepulauan Seribu. Total ada 9 sungai yang mengalirkan sampah ke Kepulauan Seribu. Sebanyak 7 sungai dari Jakarta, 1 sungai dari Banten, dan 1 sungai dari Bekasi. Setiap sungai itu membawa sampah seberat 7 ton. Dari 110 pulau di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka merupakan pulau yang mendapat tekanan terberat. Statusnya sebagai pulau konservasi, pusat pemerintah, dan permukiman membuat penanganan sampah menjadi tak mudah. Ada banyak perspektif dan kepentingan terkait dengan upaya penanganan sampah di Pulau Pramuka. Pendukung konservasi berbeda keinginan dengan pengelola wisata, sementara pegiat lingkungan ingin menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan.

Konsep pariwisata berkelanjutan dinilai menjadi jawaban yang sesuai bagi wisatawan yang selama ini resah dengan kerusakan dan mereka yang sangat peduli pada kelestarian lingkungan. Dalam

upaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan sekaligus tetap aktif menjaga kelestarian lingkungan, Kementerian Pariwisata memperkenalkan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Laju perkembangan industri pariwisata mesti diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam melestarikan objek wisata. Masyarakat tidak boleh hanya fokus pada investasi jangka pendek saja, tapi juga harus memikirkan investasi jangka panjang dengan mencoba melestarikan alam.

Kementerian Pariwisata kini gencar melakukan kampanye pariwisata berkelanjutan dengan menjadikan jurus 3P (*planet*, *people*, dan *prosperity*) sebagai acuan dalam pengembangan pariwisata (bisnis.com, 2019). Aspek *people* merujuk pada keinginan wisatawan dengan mengajak mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lokal. Sementara *aspek planet* merupakan kewajiban para wisatawan untuk turut serta merawat dan menjaga tempat-tempat wisata. Pembangunan juga mesti memperhatikan nilai-nilai ekonomis dari tempat wisata dan dampaknya pada penduduk lokal yang tertuang dalam aspek *prosperity*. Selain itu, komitmen mempromosikan pariwisata berkelanjutan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong semua daerah yang menjadi destinasi wisata di Indonesia untuk berusaha mendapatkan sertifikasi pariwisata berkelanjutan sebagai syarat menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Karena Kepulauan Seribu telah menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia yang terutama menawarkan keindahan alam kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara,

maka merupakan suatu keharusan bagi pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan. Hal ini pula yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dengan mengacu pada kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

B. Identifikasi Masalah

1. Kepulauan Seribu masih mengalami berbagai masalah lingkungan hidup seperti kelangkaan air bersih, permukiman padat penduduk di sejumlah pulau hunian, dan sampah.
2. Masyarakat Kepulauan Seribu belum dilibatkan secara serius untuk membangun fondasi pariwisata berkelanjutan.
3. Pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu yang dilakukan selama ini belum dapat memberikan manfaat sosial ekonomi secara adil kepada semua *stakeholder*.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini tidak semua aspek penerapan parawisata berkelanjutan akan diteliti. Penelitian akan difokuskan pada aspek-aspek penerapan yang mengacu pada empat kriteria standar pariwisata berkelanjutan dari Global Sustainable Tourism Council Versi 2.0 (2019) yaitu manajemen keberlanjutan (*sustainable management*), keberlanjutan sosial-ekonomi (*socio-economic sustainability*), keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*), dan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) yang memiliki kesesuaian dengan kriteria standar yang ada pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

D. Rumusan Masalah

Masalah penelitian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:
“Bagaimana kesesuaian penerapan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dengan kriteria standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC)?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dengan kriteria standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian berguna untuk:

1. Secara akademis, memperkaya referensi ilmiah mengenai penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata.
2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pengelola destinasi wisata, pemerintah, dan masyarakat di Kepulauan Seribu dalam menjaga kelangsungan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian adalah dituangkan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima Bab.

Bab I berisi uraian mengenai berbagai hal yang melatar-belakangi penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, tinjauan pustaka dari beberapa sumber yang relevan, dan kerangka pemikiran.

Bab III berisi uraian mengenai tempat dan waktu penelitian; metode penelitian; definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; uji instrumen penelitian; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.

Bab IV berisi uraian mengenai deskripsi Kepulauan Seribu, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II
PENELITIAN TERDAHULU, TINJAUAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran kepustakaan secara *online*, tidak banyak penelitian yang telah dilakukan dengan topik pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), tetapi ada tiga artikel jurnal internasional yang berisi hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini yaitu *Improving Tourism Destination Management Through Sustainable Tourism Development Model A Case Study on TSR* dari Edy Sahputra Sitepu (Politeknik Negeri Medan), *Sustainable Mountain Tourism: An Analysis of Bosnia-Herzegovina's Wine Tourism and its Future* dari John Hudelson (Global Wine Studies, Central Washington University), dan *Evaluating implementation of a CSR program for Sustainable Tourism Development in Indonesia: A Case Study of Global Geopark Ciletuh* dari N. Nurlaela Arief, Melia Famiola, M. Rahman Roestan, dan Zaki Zakaria.

Menurut Sitepu (2019), sebagai destinasi prioritas, kawasan Danau Toba harus segera dibersihkan agar tidak ketinggalan dibandingkan dengan destinasi lain. Salah satu indikator penting tata kelola pariwisata yang baik di destinasi prioritas ini adalah, ketika destinasi tersebut telah menjalankan manajemen dan pengembangan pariwisata/destinasi dengan prinsip *sustainable tourism development* (STD). Menurut Global Sustainable Tourism Council (GSTC), prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, antara lain adalah: 1) menunjukkan manajemen berkelanjutan yang efektif, 2) memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negatif; 3)

memaksimalkan manfaat bagi warisan budaya dan meminimalkan dampak negatif; dan 4) memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Penelitian ini mencoba untuk menilai dan mempengaruhi salah satu tujuan penting di daerah Danau Toba, yaitu Taman Simalem Resort (TSR) yang terletak tepat di tepi Danau Toba, Kecamatan Merek, Karo Distrik. Diharapkan dengan mendorong TSR dalam menerapkan STD, TSR dapat menjadi juara lokal dan menjadi model aplikasi STD di Wilayah Danau Toba.

Menurut Hudelson (2014), Bosnia-Herzegovina adalah salah satu negara paling terbelakang di Benua Eropa namun memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata bagi para petualang *outdoor*, penggemar sejarah, dan sekarang, para pecinta anggur. Bagian selatan dari negara ini selalu menjadi area produksi anggur, tetapi industri tersebut lambat untuk berkembang menjadi pengekspor bersih anggurnya. Akan lebih menguntungkan bagi Bosnia-Herzegovina untuk mengikuti jejak tetangga baratnya, Kroasia, dan mengembangkan industri anggur melalui pariwisata anggur. Penelitian ini menemukan bahwa potensi wisata anggur di Bosnia-Herzegovina mendapat manfaat dari kemampuan unik wilayah ini untuk menghasilkan varietas anggur yang berbeda, keindahan pemandangannya, dan keuntungan dari biaya rendah dan upah, yang memungkinkannya untuk bersaing dengan pariwisata anggur yang lebih maju di negara-negara tetangga.

Menurut Arief, Famiola, Roestan, dan Zakaria, Program CSR PT Bio Farma Indonesia (BFI) telah memainkan peran penting melalui cara-cara baru untuk mencapai keberhasilan ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan mengakomodasi penciptaan

pertumbuhan bisnis sambil mempromosikan manfaat kepada masyarakat melalui penciptaan nilai bersama. Penerapan model bisnis yang digunakan oleh PT BFI yang ikut mengembangkan program CSR di Ciletuh Palabuhanratu Global Geopark, akan memungkinkan diseminasi solusi dan teknologi yang lebih efisien dan efektif dalam industri untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bagi pelanggan dan perusahaan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Secara ringkas perbedaan masing-masing penelitian tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 2-1.

Tabel 2-1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode	Teknik Pengumpu-lan Data	Hasil Penelitian
Edy Sahputra Sitepu	Improving Tourism Destination Management Through Sustainable Tourism Development Model A Case Study on TSR	Kualitatif dan kuantita-tif	Focus Group Discussion	TSR pada dasarnya memiliki kesadaran dan komitmen yang baik dalam menerapkan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan.
John Hudelson	Sustainable Mountain Tourism: An Analysis of Bosnia-Herzegovina's Wine Tourism and its Future	Kualitatif	Kepustakaan dan dokumentasi	Wisata anggur di Bosnia-Herzegovina memiliki potensi untuk menarik pembiayaan internasional dan memicu pendekatan terpadu untuk pariwisata yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan menciptakan merek baru yang menguntungkan bagi kawasan secara keseluruhan.

N. Nurlaela Arief Melia Famiola M. Rahman Roestan Zaki Zakaria	Evaluating implementation of a CSR program for Sustainable Tourism Development in Indonesia: A Case Study of Global Geopark Ciletuh	Kualitatif	Wawancara semi-terstruktur	Penerapan model bisnis yang digunakan oleh PT BFI yang berbagi dalam mengembangkan program CSR di Ciletuh Palabuhanratu Global Geopark, akan memungkinkan diseminasi solusi dan teknologi yang lebih efisien dan efektif dalam industri untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bagi pelanggan dan perusahaan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah Pariwisata Berkelanjutan

Pada awal 1990-an, istilah pariwisata berkelanjutan mulai banyak digunakan di kalangan akademisi dan praktisi. Istilah itu sendiri muncul dari wacana yang lebih luas tentang gagasan pembangunan berkelanjutan, yang menurut Bramwell dan Lane (1993) pertama kali diartikulasikan pada tahun 1973 dan memperoleh momentum melalui World Conservation Strategy 1980. World Commission on Environment and Development mempopulerkan konsep ini pada akhir 1980-an, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987). Pada dasarnya,

pembangunan berkelanjutan menganjurkan penggunaan bijak dan konservasi sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan jangka panjang (Eber, 1992). Pembangunan berkelanjutan merupakan kemungkinan yang menarik untuk melanjutkan pembangunan ekonomi yang tidak terlalu membebani daya dukung lingkungan, sosiokultural, atau ekonomi bumi.

Pariwisata berkelanjutan dapat dianggap paling mendasar sebagai penerapan ide pembangunan berkelanjutan untuk sektor pariwisata yaitu, pengembangan pariwisata yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau pariwisata yang dengan bijak menggunakan dan melestarikan sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan jangka panjangnya (Weaver, 2006). Pada dasarnya, pariwisata berkelanjutan melibatkan minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif. Namun, sementara pariwisata berkelanjutan karenanya dapat dianggap sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan (yaitu pembangunan sebagai suatu proses) serta sebagai sarana untuk mencapai yang terakhir (yaitu pembangunan sebagai tujuan), tidak ada hubungan langsung antara kedua istilah tersebut.

Di antara akademisi dan organisasi pariwisata, atau mereka yang secara khusus menyadari potensi besar sektor ini untuk menghasilkan biaya dan manfaat, diskusi yang secara eksplisit menggunakan istilah pariwisata berkelanjutan pertama kali muncul pada awal 1990-an. Perkembangan penting adalah peluncuran Journal of Sustainable Tourism pada tahun 1993. Sebelumnya beberapa akademisi terutama Murphy (1985) dan Krippendorf (1987), tidak menggunakan istilah pariwisata berkelanjutan secara eksplisit, masing-masing merujuk pada pariwisata berbasis masyarakat dan *soft tourism*, tetapi

mendukung prinsip-prinsip serupa dalam merujuk pada pariwisata masal.

2. Manajemen Pariwisata Berkelanjutan

Manajemen pariwisata berkelanjutan mencakup berbagai alat dan praktik baik, dengan keterlibatan kepentingan publik dan pribadi terhadap lingkungan, dan organisasi internasional yang terlibat dalam pelestarian warisan alam, budaya, dan sejarah (Modica dan Uysal, 2016). Pengaruh dan dampak positif dari pengelolaan pariwisata dalam perspektif berkelanjutan dapat ditunjukkan melalui representasi grafik yang dirangkum pada Gambar 2-1. Selain manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan sosial juga dapat memengaruhi tingkat penggunaan sumber daya manusia dan profitabilitas bisnis.

Manajemen dan *monitoring* dampak pariwisata terhadap lingkungan sosial dan alam dapat dianggap sebagai variabel independen dan memiliki potensi untuk mempertahankan hubungan antara beragam aspek dari tema inti keberlanjutan dan konjugasinya di berbagai destinasi di seluruh dunia.

Gambar 2-1
Manajemen Pariwisata Berkelanjutan

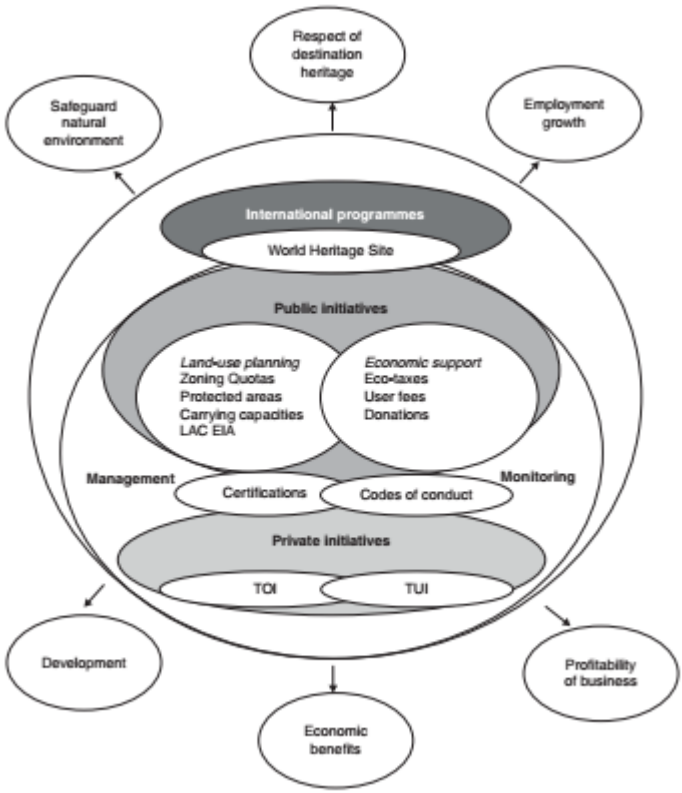

Sumber: Modica (2015)

3. Indikator Pariwisata Berkelanjutan

Pendekatan mana pun yang diadopsi, keputusan perencanaan dan manajemen yang efektif membutuhkan pengetahuan yang relevan dan memadai untuk kompleksitas situasi yang dihadapi. Informasi terkait pariwisata telah berkembang secara dramatis selama dekade terakhir, tetapi sebagian besar tidak berguna atau menyesatkan. Selain itu, sambil memberi kesan bahwa *database* yang memadai dan relevan tersedia, sejumlah besar pengetahuan ini menutupi fakta bahwa informasi strategis tentang aspek-aspek utama keberlanjutan masih sangat kurang.

Indikator-indikator, atau variabel-variabel yang dapat diukur dan dimonitor untuk mengungkapkan kondisi perubahan suatu fenomena tertentu, adalah sarana di mana informasi yang ada dapat disaring dan informasi baru dikumpulkan. Kumpulan informasi penting baru ini memudahkan untuk mengenali tren serta ancaman yang lebih cepat dan untuk mengambil tindakan yang sesuai. Menurut WTO (1996), indikator mengukur informasi yang dengannya pengambil keputusan dapat mengurangi kemungkinan tanpa sadar mengambil keputusan yang buruk. Meski bagus secara teoritis, strategi pariwisata berkelanjutan berbasis indikator dipersulit oleh proses aktual dalam memilih, mengukur, memantau, dan mengevaluasi serangkaian variabel yang relevan.

Mengingat sifat kompleks dari sistem pariwisata, secara teoritis ada sejumlah indikator terkait pariwisata yang tak terbatas untuk dipilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktual indikator kerja di destinasi atau bisnis tertentu termasuk relevansi kebijakan, jenis pendekatan untuk keberlanjutan yang diadopsi (yaitu lemah atau kuat, minimalis atau komprehensif), terukur, kendala sumber daya keuangan dan lainnya, kepentingan pemangku kepentingan , tingkat dukungan publik dan politik. Dengan demikian, sebuah resor pantai mewah yang menggunakan pendekatan komprehensif menuju keberlanjutan membutuhkan set indikator yang tumpang tindih tetapi umumnya berbeda dari set yang dibutuhkan oleh pusat kota besar yang dibatasi secara finansial di mana lebih banyak model minimalis diikuti. Pertimbangan yang menarik adalah bahwa sementara proses seleksi harus mengikuti dari definisi keberlanjutan yang diadopsi, penciptaan set indikator sebenarnya dapat berfungsi pada gilirannya untuk menyempurnakan definisi ini.

Mengacu pada pembangunan berkelanjutan secara lebih umum, Bossel (1999) berpendapat

bahwa indikator harus kompak namun komprehensif, sehingga tidak terlalu memakan waktu dan mahal untuk dioperasikan tetapi masih menangkap informasi penting. Selain itu, indikator individu harus dapat dimengerti, praktis, didefinisikan dengan jelas dan dapat diproduksi kembali. Analogi yang berguna dapat dibuat dengan sampling statistik, di mana karakteristik beberapa ratus responden yang dipilih dan disurvei dengan cermat dapat dianggap sebagai representasi akurat dari populasi keseluruhan yang jauh lebih besar. Demikian pula, beberapa indikator yang dipilih dan dipantau dengan cermat dapat secara akurat menggambarkan kondisi seluruh sistem pariwisata.

Sebuah indikator harus memasukkan variabel yang menggambarkan kondisi, kelayakan dan pengaruh potensial dari sistem itu sendiri (misalnya jumlah wisatawan, pertumbuhan tahunan, unit akomodasi, persentase angkatan kerja yang dipekerjakan dalam pariwisata) serta variabel yang menunjukkan pengaruh dari sistem target pada kelayakan sistem lain (misalnya tingkat polusi air dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata, jumlah makanan domestik dan impor yang dikonsumsi oleh industri pariwisata) (Bossel, 1999). Ketika pendekatan keberlanjutan yang komprehensif diambil, penting juga untuk memasukkan indikator yang mengukur kondisi keseluruhan sistem eksternal (misalnya tingkat kematian bayi, persentase keseluruhan angkatan kerja yang menganggur, PDB per kapita), karena masalah di bidang ini dapat langsung dan konsekuensi yang mengerikan bagi pariwisata, apakah pariwisata berkontribusi signifikan terhadap nilai-nilai tersebut atau tidak. Intinya, ketiga jenis indikator ini bergabung untuk menangkap dimensi internal dan eksternal sistem pariwisata.

Salah satu metode untuk menyederhanakan indikator adalah dengan membangun indikator

agregat atau campuran. Contoh yang terkenal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari United Nations Development Programme (UNDP), yang menggabungkan variabel ekonomi seperti PDB per kapita dengan indikator sosial seperti usia harapan hidup dan melek huruf untuk mendapatkan skor yang menggambarkan tingkat perkembangan keseluruhan negara di suatu negara (UNDP, 2003). Skor tersebut, bagaimanapun, dapat menyesatkan jika bobot yang tinggi atau rendah diberikan kepada variabel konstituen, atau jika mereka semua hanya diberi bobot yang sama. Sesuai dengan peran kepemimpinannya di bidang pariwisata berkelanjutan, WTO telah terlibat dengan indikator sejak awal 1990-an. Pada tahun 1993, Satuan Tugas dibentuk untuk mengidentifikasi serangkaian indikator pariwisata berkelanjutan yang relevan yang kemudian diuji melalui proyek percontohan lokal di Kanada, Belanda, Meksiko, Argentina, dan Amerika Serikat. Proyek-proyek ini memuncak dalam publikasi panduan yang cocok untuk manajer destinasi (WTO, 1996). Menyatukan tuntutan untuk sejumlah besar indikator, WTO mengidentifikasi sebelas indikator inti yang akan menyediakan kerangka dasar untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan di setiap destinasi (lihat Tabel 2-2). Tambahan ini adalah indikator yang sangat relevan dengan lingkungan dan lokasi tertentu, seperti zona pesisir, gunung, daerah perkotaan dan pulau-pulau kecil (lihat Tabel 2-3). Tiga indikator agregat tambahan, mengukur daya dukung, stres situs dan daya tarik, disusun yang menggabungkan variabel inti dan spesifik lingkungan. Indeks stres situs misalnya, mengukur intensitas penggunaan di *hot spot* yang dipilih dan memasukkan jumlah pengunjung, jenis dan frekuensi aktivitas wisatawan dan pola konsentrasi spasial/temporal, serta variabel idiosinkratik yang sesuai. Namun demikian, semua indikator WTO dianggap sebagai didorong

permintaan dalam arti mereka secara khusus dimaksudkan untuk berguna bagi para manajer untuk membuat keputusan praktis (WTO, 1996).

WTO telah menghasilkan skema sederhana yang membantu manajer lokal untuk memilih serangkaian indikator spesifik lokasi yang sesuai untuk menambah rangkaian inti yang dibahas di atas. Ini terdiri dari lima kriteria yang dapat menentukan peringkat kandidat sebagai tinggi, sedang atau rendah dalam hal pemenuhan kriteria tersebut. Obibilitas menggambarkan apakah data tersedia, sedangkan dapat dimengerti dan kredibilitas menjelaskan apakah indikatornya mudah dipahami dan didukung oleh informasi yang dapat diandalkan. Temporalitas dan komparabilitas mempertimbangkan apakah indikator memungkinkan identifikasi tren baik internal maupun eksternal ke area studi dan seiring waktu. Kriteria prediktif keberlanjutan menilai kapasitas peringatan dini indikator, sementara nilai ambang menggambarkan apakah yang terakhir tersedia untuk variabel itu. Indikator yang mencapai peringkat tinggi pada semua atau sebagian besar kriteria adalah kandidat yang kuat untuk masuk seleksi (WTO, 1996).

Tabel 2-2
Indikator Inti WTO Untuk Pariwisata Berkelanjutan

Indikator	Ukuran Spesifik
1. Perlindungan situs	Kategori perlindungan situs menurut indeks IUCN
2. Stres	Jumlah wisatawan yang mengunjungi situs (per tahun/bulan puncak)
3. Intensitas penggunaan	Intensitas penggunaan di periode puncak (orang per hektar)
4. Dampak sosial	Rasio wisatawan terhadap penduduk lokal (periode puncak dan lembur)
5. Kontrol pembangunan	Keberadaan prosedur peninjauan atau kontrol formal lingkungan atas pembangunan situs dan kepadatan situs

6. Manajemen Limbah	Persentase limbah dari situs yang menerima perlakukan (juga batasan kapasitas infrastruktur lain di situ, seperti pasokan air)
7. Proses perencanaan	Keberadaan rencana wilayah terorganisir untuk wisatawan untuk kawasan destinasi wisata
8. Ekosistem kritis	Jumlah spesies langka/terancam punah
9. Kepuasan konsumen	Tingkat kepuasan pengunjung (berbasis kuesioner)
10. Kepuasan penduduk lokal	Tingkat kepuasan penduduk lokal (berbasis kuesioner)
11. Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal	Proporsi kegiatan ekonomi total yang dihasilkan hanya dari pariwisata

Sumber: WTO (1996)

Tabel 2-3
Contoh Indikator Pelengkap WTO Untuk Pariwisata Berkelanjutan Bagi Lingkungan Terpilih

Lingkungan	Indikator	Ukuran yang disarankan
Zona pantai	Tingkat erosi pantai	% pantai yang mengalami erosi
	Intensitas penggunaan pantai	Orang per meter pantai yang dapat diakses
Gunung	Tingkat erosi yang diakibatkan wisatawan	% permukaan yang mengalami kondisi erosi
Taman margasatwa	Jumlah manusia di taman dan area sekitar	Jumlah orang dalam batas 10 km
	Tingkat perburuan di taman	Jumlah insiden perburuan yang dilaporkan
Lingkungan perkotaan	Pengukuran polusi udara	Jumlah hari melebihi standar polutan yang ditetapkan
Situs budaya	Biaya restorasi	Estimasi biaya untuk mempertahankan/merestorasi situs per tahun
	Ukuran-ukuran	Vibrasi lalu-lintas, jumlah insiden vandalisme per tahun

	perilaku mengganggu	
Situs ekologi unik	Perubahan dalam bauran dan konsentrasi flora	Spesies flora utama sebagai% total tutupan tanaman
Masyarakat tradisional	Dampak sosial	Rata-rata pendapatan bersih wisatawan/rata-rata pendapatan bersih penduduk lokal
Pulau-pulau kecil	Ukuran pelarian modal	% Kebocoran perdagangan dari total penerimaan pariwisata
	Ketersediaan air tawar	Volume air yang digunakan wisatawan/volume yang digunakan penduduk lokal atas basis per kapita

Sumber: WTO (1996)

4. Kriteria Standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Kriteria standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) diciptakan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria destinasi GSTC, dikenal secara informal juga sebagai GSTC-D, adalah jumlah minimum yang harus dicapai oleh destinasi wisata di mana pun (GSTC, 2019). Kriteria tersebut diorganisasikan di sekitar empat tema utama: manajemen berkelanjutan; dampak sosial-ekonomi; dampak budaya; dan dampak lingkungan.

Kriteria standar GSTC telah dikembangkan dan direvisi sambil berusaha untuk mematuhi Standard-Setting Code of the ISEAL Alliance, sebuah badan yang diakui untuk memberikan panduan tentang norma-norma internasional untuk mengembangkan standar keberlanjutan di semua sektor. Revisi terbaru dari GSTC-D terjadi pada tahun 2019 dan didasarkan pada dua kali konsultasi dengan *stakeholder*.

Beberapa penggunaan kriteria destinasi GSTC meliputi:

- Berfungsi sebagai basis sertifikasi untuk keberlanjutan.
- Berfungsi sebagai pedoman dasar untuk destinasi yang ingin menjadi lebih berkelanjutan.
- Membantu konsumen mengidentifikasi tujuan wisata berkelanjutan yang sehat.
- Berfungsi sebagai penyebut yang umum bagi media informasi untuk mengenali tujuan dan menginformasikan kepada publik tentang keberlanjutannya.
- Membantu sertifikasi dan program tingkat destinasi sukarela lainnya memastikan bahwa standar mereka memenuhi garis dasar yang diterima secara luas.
- Menawarkan program pemerintah, non-pemerintah, dan sektor swasta titik awal untuk mengembangkan persyaratan pariwisata berkelanjutan.
- Berfungsi sebagai pedoman dasar untuk badan pendidikan dan pelatihan, seperti sekolah dan perguruan tinggi pariwisata.
- Menunjukkan kepemimpinan yang menginspirasi orang lain untuk bertindak.

Kriteria standar GSTC yang telah dirancang tidak berhubungan dengan suatu badan tetapi lebih ke nama tempat yang dapat diidentifikasi secara unik. Kriteria hanya mensyaratkan bahwa kondisi yang dijelaskan berkaitan dengan destinasi tersebut, terlepas dari badan apa yang bertanggung jawab untuknya atau bagaimana atau oleh siapa tindakan terkait dilaksanakan.

Kriteria ada dalam empat bagian, masing-masing dengan dua atau tiga sub-bagian, seperti yang ditunjukkan Tabel 2-4. Urutan bagian dan sub-bagian sama sekali tidak menunjukkan kepentingan relatif setiap topik.

Tabel 2-4
Struktur Kriteria

SECTION A: Sustainable management	**SECTION C: Cultural sustainability**
A(a) Management structure and framework	C(a) Protecting cultural heritage
A(b) Stakeholder engagement	C(b) Visiting cultural sites
A(c) Managing pressure and change	
SECTION B: Socio-economic sustainability	**SECTION D: Environmental sustainability**
B(a) Delivering local economic benefits	D(a) Conservation of natural heritage
B(b) Social wellbeing and impacts	D(b) Resource management
	D(c) Management of waste and emissions

Sumber : GSTC (2019)

C. Kerangka Pemikiran

Keberlanjutan di Kepulauan Seribu adalah tentang keseimbangan antara kepentingan ekologis, ekonomi dan sosial. Di satu sisi, penting untuk berkembang selaras dengan alam dan manusia, namun tetap otentik dan hemat energi. Di sisi lain, keberlanjutan ekonomi berarti bahwa investasi yang dilakukan hari ini harus tetap berfungsi pada generasi mendatang, dalam jangka panjang. Penggunaan yang cermat dan perlindungan sumber daya alam yang penting adalah aspek penting dari keberlanjutan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan berarti menjadikan destinasi sebagai lingkungan yang layak huni di masa depan, sementara pada saat yang sama melindungi alam dan pertanian, dengan setidaknya 20 atau 30 tahun ke depan. Sebuah dorongan penting untuk membingkai dan melakukan kegiatan secara berkelanjutan berasal GSTC yang telah mengembangkan kriteria untuk sektor pariwisata yang sesuai dengan Standard-Setting Code of the ISEAL Alliance. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan juga

telah mengadopsi kriteria berstandar internasional dari GSTC tersebut. Seandainya Kepulauan Seribu telah menerapkan kriteria GSTC sesuai peraturan menteri pariwisata maka Kepulauan Seribu berpotensi menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 3-2.

Gambar 3-2
Kerangka Pemikiran

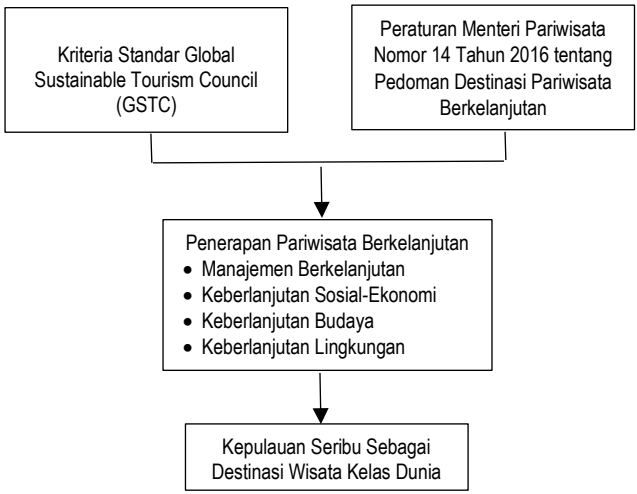

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 3 bulan dari Maret 2020 hingga Mei 2020. Rincian untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3-1.

Tabel 3-1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2020											
		Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal												
2	Validasi instrumen												
3	Penentuan responden												
4	Pengumpulan data												
5	Analisis data												
6	Penulisan laporan penelitian												

B. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif menekankan pengukuran objektif dan analisis statistik, matematika, atau numerik data yang

dikumpulkan melalui jajak pendapat, kuesioner, dan survei, atau dengan memanipulasi data statistik yang sudah ada sebelumnya menggunakan teknik komputasi (Babbie, 2010). Penelitian bersifat deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan fenomena yang menjadi objek penelitian.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Kriteria Destinasi GSTC, dikenal secara informal juga sebagai GSTC-D, adalah jumlah minimum yang harus dicapai oleh tujuan wisata mana pun. Mereka diorganisasikan di sekitar empat tema utama: manajemen berkelanjutan; dampak sosial-ekonomi; dampak budaya; dan dampak lingkungan. Mereka memiliki penerapan pada seluruh sektor pariwisata. Kriteria ada dalam empat bagian, masing-masing dengan dua atau tiga sub-bagian, seperti yang ditunjukkan Tabel 3-2.

Tabel 3-2
Bagian, Kriteria, dan Indikator

Bagian	Kriteria	Indikator
Manajemen Berkelanjutan	Struktur dan kerangka manajemen	• Tanggung-jawab manajemen destinasi • Strategi manajemen destinasi dan rencana tindakan • *Monitoring* dan pelaporan
	Keterlibatan *stakeholder*	• Keterlibatan perusahaan dan standar keberlanjutan • Keterlibatan penduduk dan umpan balik

		• Keterlibatan pengunjung dan umpan balik • Promosi dan informasi
	Mengelola tekanan dan perubahan	• Mengelola volume dan kegiatan pengunjung • Merencanakan regulasi dan kontrol pembangunan • Adaptasi perubahan iklim • Manajemen risiko dan krisis
Keberlanjutan Sosial-Ekonomi	Pemberian manfaat ekonomi lokal	• Mengukur kontribusi ekonomi dari pariwisata • Peluang kerja dan karier yang layak • Mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil
	Kesejahteraan dan dampak sosial	• Mendukung masyarakat • Menghindari eksploitasi dan diskriminasi • Properti dan hak-hak pengguna • Keselamatan dan keamanan • Akses untuk semua
Keberlanjutan Budaya	Melindungi warisan budaya	• Perlindungan aset-aset budaya • Artefak budaya • Warisan tak berwujud • Akses tradisional • Properti intelektual
	Mengunjungi situs budaya	• Manajemen pengunjung pada situs budaya

		• Interpretasi situs
Keberlanjutan Lingkungan	Konservasi warisan alam	• Perlindungan lingkungan sensitif • Manajemen pengunjung pada situs alam • Interaksi satwa liar • Eksploitasi spesies dan kesejahteraan hewan
	Manajemen sumberdaya	• Konservasi energi • Pengelolaan air • Kualitas air
	Manajemen limbah dan emisi	• Air limbah • Limbah padat • Emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim • Mitigasi • Transportasi berdampak rendah • Polusi cahaya dan suara

Sumber: GSTC (2019)

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Kriteria standar GSTC telah dirancang untuk berbagai destinasi dan kriteria tersebut tidak berhubungan dengan suatu badan tetapi lebih ke tempat bernama yang dapat diidentifikasi secara unik. Kriteria hanya mensyaratkan bahwa kondisi yang dijelaskan berkaitan dengan destinasi tersebut, terlepas dari badan apa yang bertanggung jawab untuk itu atau bagaimana atau oleh siapa tindakan terkait dilaksanakan. Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah semua pengelola tempat wisata yang ada di Kepulauan Seribu.

Dalam penelitian semua anggota populasi dijadikan sampel sehingga penelitian merupakan

penelitian sensus atau *sampling* jenuh. Setiap pulau wisata akan diwakili oleh satu orang pengelola tempat wisata sehingga seluruh responden akan berjumlah 51 orang yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3-3.

Tabel 3-3
Jumlah Responden

Jenis Pulau	Jumlah Responden
Pulau Hunian	11
Pulau Cagar Budaya	4
Pulau Resor	6
Pulau Tak Berpenghuni	-
	51

E. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tidak dilakukan karena penelitian menggunakan instrumen standar yang telah disusun oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang berlaku di seluruh dunia. Namun demikian, karena instrumen menggunakan Bahasa Inggris, maka sebelum disebarkan kepada responden, instrumen diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam Bahasa Indonesia. Untuk memastikan tidak terjadi kesalahan penerjemahan, maka penerjemahan dilakukan dengan menggunakan jasa penerjemah di bawah sumpah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang menyangkut variabel penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Dalam pembuatan kuesioner digunakan Skala Guttman di mana hanya ada 2 interval jawaban yang dapat dipilih responden yaitu tidak atau ya. Skala ini digunakan karena penelitian ini ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, jurnal, kertas kerja (*working paper*), artikel, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini mempunyai peranan penting terutama dalam tahap awal penelitian untuk mempelajari apakah hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat memberi sumbangan kepada penelitian yang sedang dilakukan. Di samping itu data sekunder juga sangat membantu dalam memutuskan apa yang menjadi kebutuhan penelitian selanjutnya.

G. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis kuantitatif, penilaian digunakan untuk mengukur kesesuaian penerapan Pariwisata Berkelanjutan dengan kriteria GSTC. Responden diminta memberikan nilai dengan menggunakan kriteria tidak dan ada. Tidak diberi nilai persepsi 0, sedangkan ada diberi nilai persepsi 1.

Data yang terkumpul dalam penelitian kemudian akan dideskripsikan sehingga mudah untuk dipahami menggunakan statistik deskriptif. Pendeskripsian data akan dilakukan melalui penyajian data menggunakan tabel frekuensi dan persentase.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepulauan Seribu

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang secara geografis terletak pada posisi antara 106º19'30" - 106º44'50" Bujur Timur dan 5º10'00" - 5º57'00" Lintang Selatan serta memiliki luas 4.745,62 km^2 yang terdiri dari 8,76 km^2 daratan dan 4.690,85 km^2 lautan serta terdiri lebih dari 110 buah pulau. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sendiri terbagi dalam dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Terdapat enam Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Kepulauan Seribu berbatasan di sebelah utara dengan Laut Jawa atau Selat Sunda, berbatasan di sebelah timur dengan Laut Jawa, berbatasan di sebelah selatan dengan Jakarta Utara dan berbatasan di sebelah barat dengan Laut Jawa atau Selat Sunda. Wilayah Kepulauan dapat dilihat pada Gambar 4-1.

Gambar 4-1
Peta Kepulauan Seribu

Sumber: pulauseribu.jakarta.go.id (2020)

Berdasarkan data sensus dari BPS, Kepulauan Seribu tahun 2016, rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Seribu adalah 2.717 jiwa/km^2 (Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 3.196 jiwa/km^2 dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebesar 2.458 jiwa/km^2). Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu terdiri dari berbagai etnis dengan beragam agama, adat istiadat, seni budaya dan kebiasaan.

Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata menyimpan keindahan bahari yang beraneka ragam. Wisatawan dapat naik kapal dari pelabuhan di Muara Angke, Muara Kamal, atau deretan Dermaga Pantai Marina Ancol untuk menuju ke Kepulauan Seribu, tergantung pulau yang dituju dan jenis kapal yang diinginkan. Wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas seperti bermain di hamparan pasir putih dan air laut yang bening, *snorkeling* dengan pemandangan terumbu karang dan ikan yang berwarna-warni di perairan dangkal dengan air jernih, bersepeda keliling pulau, menyelam, melihat

penangkaran penyu sisik yang dilindungi, melihat pemandangan matahari terbit dan terbenam, mengelilingi pulau dengan sepeda motor, melakukan kegiatan *watersport* seperti *banana boat*, *doughnut boat*, atau *jet ski*. Beberapa pulau juga menyediakan penginapan di rumah-rumah penduduk, layanan klinik kesehatan, dan rumah makan. Beragam aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan dapat dilihat pada Gambar 4-2.

Gambar 4-2
Beragam Aktivitas Wisata di Kepulauan Seribu

Sumber: www.kepulauan-seribu.com (2020)

2. Profil Pulau Tujuan Wisata Utama di Kepulauan Seribu

a. Pulau Bidadari

Pulau Bidadari berjarak 15 kilometer dari Jakarta yang dapat ditempuh 30 menit menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Wisatawan umumnya sangat menyukai *cottage* terapung dan darat yang ada di sana. Berbagai fasilitas ditawarkan oleh pengelola destinasi mulai dari olah raga air, bersepeda keliling pulau, bermain di pantai dan lain-lain. Di Pulau Bidadari terdapat sebuah benteng peninggalan Belanda abad ke-17 yaitu Benteng

Martello yang sering menjadi lokasi foto favorit wisatawan.

Gambar 4-3
Pulau Bidadari

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

b. Pulai Ayer

Pulau Ayer dapat ditempuh 20 sampai 30 menit menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Pulau Ayer merupakan pulau resor yang menggabungkan unsur tradisional etnik Papua Barat dengan unsur modern. Pulau Ayer memiliki banyak pepohonan di sepanjang pinggir pantai dan memiliki banyak wahana permainan dan olahraga air yang dapat dimainkan oleh orang dewasa dan anak-anak sehingga pulau ini cocok dikunjungi oleh keluarga.

Gambar 4-4
Pulau Ayer

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

c. Pulau Alam Kotok

Pulau Alam Kotok dapat ditempuh 90 menit menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Pulau Alam Kotok merupakan destinasi utama pencinta *diving* karena menawarkan air laut yang jernih dan karang warna-warni dengan vegetasi yang masih alami. Pulau ini juga menjadi tempat konservasi maskot Provinsi DKI Jakarta yaitu burung Elang Bondol. Pulau Kotok lebih ditujukan untuk wisata berenang dan *diving* sehingga tidak dilengkapi dengan fasilitas olah raga air yang lain.

Gambar 4-5
Pulau Alam Kotok

Sumber: www.wisataseribupulau.co.id (2020)

d. Pulau Macan

Pulau Macan dapat ditempuh 1 jam 30 menit menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Pulau Macan menawarkan wisata konservasi alam berkonsep *Eco Resort Villages*. Pulau ini menyediakan berbagai fasilitas olahraga air seperti *surfing*, *snorkelling*, *diving*, dan *canoeing*.

Gambar 4-6
Pulau Macan

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

e. Pulau Pelangi

Pulau berjarak 60 kilometer dari Jakarta yang dapat ditempuh 2 jam menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Di Pulau Pelangi, wisatawan dapat menikmati pasir putih dan vegetasi rimbun alami yang dikelilingi air laut yang jernih. Di Pulau ini wisatawan bisa makan di restoran terapung, memancing, bermain tenis, *diving*, dan *snorkling*.

Gambar 4-7
Pulau Pelangi

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

f. Pulau Putri

Pulau Putri dapat ditempuh 90 menit menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Pulau ini menjadi destinasi utama wisatawan keluarga karena memiliki fasilitas dan wahana yang cocok untuk anak-

anak seperti akuarium bawah laut, *glass bottom boat*, *water boom*, *sunset cruise,* dan lapangan tenis.

Gambar 4-8
Pulau Putri

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

g. Pulau Sepa

Pulau Sepa dapat ditempuh 90 menit menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol. Pulau ini menjadi destinasi utama wisatawan yang menggemari olahraga air dan memancing. Pantainya memiliki pasir putih dan ekosistem bawah lautnya masih sangat terjaga keindahannya. Pulau ini juga menawarkan beragam *cottage* yang terbuat dari kaya yang unik dan eksotis.

Gambar 4-9
Pulau Sepa

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

h. Pulau Pantara

Pulau Pantara adalah pulau yang paling jauh dari Jakarta yang dapat ditempuh 2 jam dari Marina Ancol. Pulau Pantara merupakan pulau terbaik untuk *diving* dan *snorkelling* karena lautnya dikenal masih sangat jernih. Selain *diving* dan *snorkelling*, wisatawan bisa bermain *jet ski*, *banana boat*, dan *surfing*.

Gambar 4-10
Pulau Pantara

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

i. Pulau Royal Resort

Pulau Royal Resort menawarkan konsep semi resor yang merupakan perpaduan antara pulau penduduk dan pulau resor yang cocok untuk wisatawan yang menginginkan wisata berkelas tetapi dengan *budget* yang tidak terlalu tinggi. Di pulau ini wisatawan dapat mengunjungi bangunan *sunset deck* yang letaknya berdampingan dengan hutan *mangrove*. Wisatawan juga dapat menikmati fasilitas olahraga air seperti *jet ski*, *banana boat*, *sofa boat*, dan lain-lain.

Gambar 4-11
Pulau Royal Resort

Sumber: nusatour.co.id (2020)

j. Pulai Pari

Pulau Pari dapat ditempuh 1 jam menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol atau 2 jam menggunakan kapal feri kayu dari Kali Adem. Pulau penduduk ini memiliki dua obyek wisata andalan yaitu Pantai Perawan dan Pantai LIPI. Pulau ini memiliki pasir putih dan air laut yang jernih sehingga wisatawan dapat menyelam di perairan dangkal, menjelajahi pinggir pantai dengan sampan, atau bermain olahraga air. Wisatawan pun juga dapat berkeliling pemukiman penduduk menggunakan sepeda yang banyak disewakan di sana.

Gambar 4-12
Pulau Pari

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

k. Pulai Tidung

Pulai Tidung terkenal dengan ikonnya yaitu Jembatan Cinta dan keindahan bawah lautnya. Pulau Tidung juga sangat terkenal di kalangan wisatawan dengan *budget* rendah. Selain *cottage*, banyak penduduk yang menyewakan rumah atau kamarnya sebagai *homestay* dengan tarif yang murah. Pulau Tidung dapat dicapai menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol atau kapal feri kayu dari Kali Adem, Tanjung Pasir, dan Tanjung Kait.

Gambar 4-13
Pulau Tidung

Sumber: pulauseributraveling.com (2020)

l. Pulau Pramuka

Pulau Pramuka merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dapat ditempuh 1 jam menggunakan *speedboat* dari Marina Ancol atau 2 jam menggunakan kapal feri kayu dari Muara Angke. Karena merupakan pulau penduduk, Pulau Pramuka memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari penginapan, restoran, masjid, rumah sakit, lapangan olahraga, dan lain-lain. Pulau Harapan dikelilingi gugusan terumbu karang warna-warni dan beragam ikan hias yang menjadikan pulau ini cocok untuk *snorkelling*. Pulau Pramuka juga menjadi tempat penangkaran penyu sisik yang dilindungi.

Gambar 4-14
Pulau Pramuka

Sumber: pulauseributraveling.com, 2020

m. Pulau Harapan

Pulau Harapan adalah pulau terdekat dengan Pulau Panjang yang menjadi bandar udara Kepulauan Seribu. Pulau Harapan cocok untuk wisatawan yang gemar *snorkelling* karena dikelilingi terumbu karang warna-warni dan berbagai ikan hias yang berenang di antaranya. Wisata andalan Pulau Harapan adalah berkeliling pulau ke beberapa pulau yang ada di dekatnya yaitu Pulau Bira Besar, Pulau Bulat, dan Pulau Perak menggunakan perahu tradisional.

Gambar 4-15
Pulau Harapan

Sumber: pulauseributraveling.com, 2020

n. Pulau Payung

Pulau Payung adalah pulau penduduk dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kepulauan Seribu. Pulau Payung cocok untuk wisatawan dengan *budget* rendah yang menginginkan suasana yang tidak terlalu ramai. Wisatawan dapat mengelilingi pemukiman penduduk menggunakan sepeda, menyelam di perairan dangkal, dan dapat menginap di *homestay* yang banyak dikelola oleh penduduk lokal.

Gambar 4-16
Pulau Payung

Sumber: travelpulauseribu.co.id, 2020

B. Hasil Penelitian

1. Manajemen Berkelanjutan

a. Struktur dan Kerangka Manajemen

1) Tanggung-Jawab Manajemen Destinasi

Tabel 4-1
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A1

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Bukti dokumenter yang menunjukkan susunan dan tanggung-jawab kelompok yang relevan.	0	0	51	100
b.	Rencana keuangan dan anggaran yang menunjukkan sumber pendanaan saat ini dan masa depan.	0	0	51	100
c.	Bukti hubungan dan keterlibatan dengan badan-badan lain.	2	4	49	96

d.	Catatan staf permanen dan personel yang dikontrak, menunjukkan pengalaman yang relevan.	0	0	51	100
e.	Pedoman dan proses manajemen, yang menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam operasi dan pemberian kontrak	0	0	51	100
		2	0,8	253	99,2

Destinasi secara umum belum memiliki organisasi, departemen, kelompok, atau komite yang efektif yang bertanggung-jawab terhadap pendekatan terkoordinasi untuk pariwisata berkelanjutan, dengan keterlibatan yang rendah oleh sektor swasta, sektor publik dan masyarakat sipil. Kalaupun ada, kelompok-kelompok ini belum memiliki tanggung-jawab, pengawasan, dan kapabilitas implementasi yang jelas untuk pengelolaan masalah sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan. Kelompok tersebut juga belum memiliki dana yang memadai, belum bekerja dengan berbagai badan dalam manajemen destinasi, belum memiliki akses ke kepegawaian yang memadai (termasuk personel yang berpengalaman dalam keberlanjutan) dan belum mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam operasi dan transaksinya.

2) Strategi Manajemen Destinasi dan Rencana Aksi

Tabel 4-2
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A2

Indikator		**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Dokumen diterbitkan yang menjelaskan strategi dan tindakan tujuan saat ini.	3	6	48	94

b.	Strategi/rencana terlihat jelas dan tersedia secara *online*.	0	0	51	100
c.	Bukti konsultasi pemangku kepentingan, pertemuan dll. dalam mengembangkan rencana.	0	0	51	100
d.	Referensi ke prinsip keberlanjutan dan penilaian aset, masalah dan risiko, yang terkandung dalam strategi dan rencana aksi.	0	0	51	100
e.	Referensi khusus dalam strategi/rencana aksi untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas (termasuk mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan) dan sebaliknya.	2	4	49	96
		5	2	250	98

Destinasi secara umum belum menetapkan dan menerapkan strategi manajemen multi-tahun dan rencana aksi yang tersedia untuk umum, sesuai dengan skalanya, dikembangkan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Strategi belum mencakup identifikasi dan penilaian aset pariwisata dan mempertimbangkan masalah dan risiko sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan. Strategi juga belum berkaitan dengan dan memengaruhi kebijakan dan tindakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas di destinasi.

3) *Monitoring* dan Pelaporan

Tabel 4-3
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A3

	Pernyataan	**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Indikator dan target sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dapat diukur dan diidentifikasi.	0	0	51	100

b.	Pengukuran terhadap indikator-indikator ini, dengan hasil dicatat dan dipublikasikan setidaknya setiap tahun.	0	0	51	100
c.	Bukti tertulis dari *monitoring* dan pelaporan tindakan dan hasil.	0	0	51	100
d.	Tinjauan sebelumnya tentang sistem *monitoring* dan jadwal untuk tinjauan di masa depan.	0	0	51	100
		0	0	204	100

Destinasi secara umum belum menerapkan sistem untuk memonitor dan menanggapi masalah sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan dan dampak yang timbul dari pariwisata. Tindakan dan hasil belum secara teratur dipantau, dievaluasi dan dilaporkan kepada publik. Sistem *monitoring* juga belum ditinjau secara berkala.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

1) Keterlibatan Perusahaan dan Standar Keberlanjutan

Tabel 4-4
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A4

	Pernyataan	**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Bukti komunikasi berkala tentang masalah keberlanjutan dengan bisnis terkait pariwisata (media, pertemuan, kontak langsung, dll.).	3	6	48	94
b.	Dukungan dan saran keberlanjutan untuk bisnis terkait pariwisata tersedia dan dipromosikan.	0	0	51	100
c.	Jumlah dan persentase bisnis yang disertifikasi berdasarkan standar keberlanjutan pariwisata dengan target untuk penjangkauan yang lebih luas.	0	0	51	100

d.	Bukti promosi skema sertifikasi.	0	0	51	100
e.	Daftar perusahaan bersertifikasi terkait pariwisata, terus diperbarui.	2	4	49	96
		5	2	250	98

Destinasi secara umum belum secara teratur menginformasikan perusahaan terkait pariwisata tentang masalah keberlanjutan dan belum mendorong dan mendukung mereka dalam membuat operasi mereka lebih berkelanjutan. Destinasi belum mempromosikan penerapan standar keberlanjutan, mempromosikan penerapan standar yang diakui GSTC-I dan skema sertifikasi terakreditasi GSTC-I untuk perusahaan pariwisata. Destinasi juga belum mempublikasikan daftar perusahaan bersertifikat keberlanjutan.

2) Keterlibatan dan Umpan Balik Penduduk

Tabel 4-5
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A5

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Bukti promosi dan fasilitasi partisipasi publik dalam perencanaan/manajemen destinasi.	41	80	10	20
b.	Informasi tentang jenis dan tingkat partisipasi tersebut.	38	74	13	26
c.	Survei penduduk dan mekanisme umpan balik sistematis lainnya, yang mencakup masalah pariwisata.	38	74	13	26
d.	Bukti tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas umpan balik penduduk.	36	71	15	29
e.	Program informasi, pendidikan dan pelatihan pariwisata disediakan untuk penduduk.	35	68	16	32
		188	74	67	26

Destinasi secara umum belum memungkinkan dan mempromosikan partisipasi publik dalam perencanaan dan manajemen destinasi berkelanjutan. Aspirasi, kepedulian dan kepuasan masyarakat lokal dengan keberlanjutan pariwisata dan manajemen destinasi belum secara teratur dimonitor dan dilaporkan secara publik, dan hampir belum ada tindakan diambil sebagai tanggapan terhadapnya. Destinasi juga belum memiliki sistem untuk meningkatkan pemahaman lokal tentang peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan dan untuk membangun kapasitas masyarakat untuk merespons.

3) Keterlibatan dan Umpan Balik Pengunjung

Tabel 4-6
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A6

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Survei pengunjung (dan mekanisme umpan balik lainnya) dilakukan dan dilaporkan.	0	0	51	100
b.	Survei dan umpan balik mencakup reaksi pengunjung terhadap masalah keberlanjutan.	0	0	51	100
c.	Bukti tindakan yang diambil dalam menanggapi survei pengunjung/temuan umpan balik.	0	0	51	100
d.	Contoh informasi pengunjung yang mencakup masalah keberlanjutan dan bagaimana meresponsnya.	0	0	51	100
		0	0	254	100

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk memonitor dan melaporkan secara publik kepuasan pengunjung terhadap kualitas dan keberlanjutan pengalaman destinasi dan, jika perlu, untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan. Pengunjung juga belum diberitahu tentang masalah

keberlanjutan di destinasi dan bagian yang dapat mereka mainkan dalam mengatasinya.

4) Promosi dan Informasi

Tabel 4-7
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A7

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Informasi terkini dan materi promosi dengan konten yang sesuai.	49	96	2	4
b.	Ada proses untuk memeriksa keakuratan dan kesesuaian promosi dan informasi destinasi.	38	75	13	25
c.	Bukti konsultasi dengan komunitas lokal dan badan lingkungan dan budaya mengenai konten dan pengiriman komunikasi.	31	61	20	39
		118	77	35	23

Materi promosi dan informasi pengunjung tentang destinasi secara umum belum akurat sehubungan dengan produk, layanan, dan keberlanjutannya klaim. Pesan pemasaran dan komunikasi lainnya belum mencerminkan nilai-nilai dan pendekatan destinasi terhadap keberlanjutan dan juga belum memperlakukan komunitas lokal serta aset budaya dengan hormat

c. Mengelola Tekanan dan Perubahan

1) Mengelola Volume dan Kegiatan Pengunjung

Tabel 4-8
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A8

Pernyataan		**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Strategi dan rencana aksi manajemen destinasi membahas musim dan penyebaran kunjungan.	0	0	51	100
b.	Variasi dalam volume pengunjung sepanjang tahun dimonitor, termasuk di lokasi yang paling banyak dikunjungi.	0	0	51	100

c.	Dampak volume dan kegiatan pengunjung diidentifikasi melalui pengamatan dan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan.	2	4	49	96
d.	Tindakan diambil untuk mengelola arus dan dampak pengunjung.	0	0	51	100
e.	Strategi pemasaran dan pemilihan target pasar memperhitungkan pola kunjungan, dampak kegiatan dan kebutuhan destinasi.	0	0	51	100
		2	0,8	253	99,2

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk manajemen pengunjung yang ditinjau secara berkala. Hampir belum ada tindakan diambil untuk memonitor dan mengelola volume dan kegiatan pengunjung, dan untuk mengurangi atau meningkatkannya seperlunya pada waktu-waktu tertentu dan di lokasi tertentu, serta belum ada upaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi lokal, masyarakat, warisan budaya, dan lingkungan.

2) Peraturan Perencanaan dan Kontrol Pembangunan

Tabel 4-9
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A9

	Pernyataan	**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Kebijakan/peraturan/pedoman khusus yang mengontrol pembangunan didokumentasikan dan diidentifikasi berdasarkan judul dan tanggal.	0	0	51	100
b.	Persyaratan penilaian dampak ditetapkan, mencakup dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, pada skala yang cukup untuk mengatasi masalah jangka panjang untuk tujuan.	0	0	51	100

c.	Peraturan khusus tentang penyewaan dan pengoperasian properti untuk pariwisata, dengan bukti penerapan dan penegakannya.	25	49	26	51
d.	Bukti partisipasi publik dalam pengembangan kebijakan/peraturan/pedoman.	0	0	51	100
e.	Bukti konsultasi dengan, dan persetujuan dari penduduk asli atau kelompok etnis minoritas ketika pengembangan pariwisata telah diusulkan atau telah terjadi di wilayah mereka.	0	0	51	100
f.	Bukti komunikasi dan penegakan kebijakan/ peraturan/pedoman, pada tahap perencanaan, pengembangan dan implementasi.	0	0	51	100
		25	8	281	92

Destinasi secara umum belum memiliki pedoman perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan yang mengontrol lokasi dan sifat pembangunan, memerlukan penilaian dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dan mengintegrasikan penggunaan lahan berkelanjutan, desain, konstruksi, dan pembongkaran. Hanya sedikit peraturan yang berlaku untuk operasi, termasuk penyewaan properti dan konsesi untuk tujuan pariwisata. Pedoman, peraturan dan kebijakan juga belum dibuat dengan partisipasi publik dan dikomunikasikan dan ditegakkan secara luas.

3) Adaptasi Perubahan Iklim

Tabel 4-10
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A10

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Strategi dan rencana aksi manajemen destinasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah iklim.	0	0	51	100

b.	Peraturan, pedoman dan zonasi untuk pengembangan dan kegiatan pariwisata mengakomodasi konsekuensi dari perubahan iklim.	0	0	51	100
c.	Penilaian risiko iklim, mencakup risiko saat ini dan masa depan dilakukan dan disediakan untuk publik.	2	4	49	96
d.	Bukti pertimbangan dampak dan kontribusi ekosistem lokal terhadap adaptasi perubahan iklim.	0	0	51	100
e.	Informasi tentang perubahan iklim yang telah tersedia untuk publik.	0	0	51	100
		2	0,8	253	99,2

Destinasi secara umum belum mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Strategi adaptasi perubahan iklim belum diupayakan untuk penentuan tapak, desain, pengembangan dan pengelolaan fasilitas pariwisata. Informasi tentang prediksi perubahan iklim, risiko terkait, dan kondisi masa depan juga belum disediakan untuk penduduk, bisnis, dan pengunjung.

4) Manajemen Risiko dan Krisis

Tabel 4-11
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator A11

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Pengurangan risiko yang terdokumentasi, manajemen krisis dan rencana tanggap darurat untuk pariwisata di destinasi.	0	0	51	100
b.	Rencana tersebut mengakui berbagai risiko, termasuk bencana alam, terorisme, kesehatan,	0	0	51	100

	penipisan sumber daya, dan lainnya yang sesuai dengan lokasi.				
c.	Prosedur komunikasi diidentifikasi untuk digunakan selama dan setelah keadaan darurat.	0	0	51	100
d.	Program untuk penyampaian informasi dan pelatihan lokal tentang manajemen risiko dan krisis.	0	0	51	100
		0	0	204	100

Destinasi secara umum belum memiliki manajemen pengurangan risiko dan krisis serta rencana tanggap darurat yang sesuai dengan destinasi. Elemen-elemen kunci belum dikomunikasikan kepada penduduk, pengunjung, dan perusahaan. Prosedur dan sumber daya juga belum dibuat untuk mengimplementasikan rencana dan secara teratur diperbarui.

2. Keberlanjutan Sosial Ekonomi

a. Memberikan Manfaat Ekonomi Lokal

1) Mengukur Kontribusi Ekonomi Pariwisata

Tabel 4-12
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B1

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Program pengumpulan data ekonomi.	48	94	3	6
b.	Laporan tahunan tentang kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung dari pariwisata di destinasi.	29	57	22	43
c.	Data yang mencakup berbagai ukuran dampak ekonomi (mis. volume, pengeluaran, pekerjaan, investasi, dan penyebaran manfaat ekonomi di destinasi).	47	92	4	8

	124	81	29	19

Kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung dari pariwisata untuk ekonomi destinasi belum dimonitor dan dilaporkan secara publik. Pengukuran belum mencakup tingkat volume pengunjung, pengeluaran pengunjung, pekerjaan dan investasi dan bukti tentang distribusi manfaat ekonomi.

2) Pekerjaan yang Layak dan Peluang Karier

Tabel 4-13
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B2

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Penyediaan program/kursus pelatihan keterampilan yang relevan, tersedia secara lokal.	51	100	0	0
b.	Pernyataan komitmen oleh perusahaan pariwisata untuk penyediaan pekerjaan/peluang karier yang layak.	48	94	3	6
c.	Peluang pelatihan dan pekerjaan dipromosikan dan diambil oleh orang-orang lokal, termasuk perempuan, kaum muda, kaum minoritas dan para penyandang cacat.	36	79	15	21
d.	Saluran untuk memeriksa kondisi kerja dan menerima/menangani keluhan (mis. keterlibatan serikat pekerja).	31	61	20	38
		166	81	38	19

Destinasi secara umum belum mendorong dan mendukung peluang karier dan pelatihan di bidang pariwisata. Perusahaan pariwisata destinasi belum berkomitmen untuk menyediakan kesetaraan kesempatan untuk pekerjaan lokal, pelatihan dan kemajuan, lingkungan kerja yang aman dan terjamin, dan upah hidup untuk semua.

3) Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan yang Adil

Tabel 4-14
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B3

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Saran, keuangan, atau dukungan lain tersedia di destinasi untuk UKM terkait pariwisata.	51	100	0	0
b.	Bantuan dengan akses pasar untuk UKM terkait pariwisata setempat.	51	100	0	0
c.	Tindakan untuk mendorong dan membantu perusahaan pariwisata setempat untuk membeli barang dan jasa secara lokal.	48	94	3	6
d.	Inisiatif untuk membantu petani lokal, pengrajin dan produsen makanan untuk terlibat dalam rantai nilai pariwisata.	36	79	15	21
e.	Produk dan kerajinan lokal diidentifikasi, dipromosikan, dan tersedia untuk dijual kepada pengunjung di destinasi.	31	61	20	38
		217	85	38	15

Destinasi secara umum belum mendorong retensi pengeluaran pariwisata dalam ekonomi lokal melalui mendukung perusahaan lokal, rantai pasokan dan investasi berkelanjutan. Destinasi juga belum mempromosikan pengembangan dan pembelian produk berkelanjutan lokal berdasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan yang mencerminkan sifat daerah tersebut.

b. Kesejahteraan Sosial dan Dampaknya

1) Dukungan untuk Masyarakat

Tabel 4-15

Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B4

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Dukungan untuk komunitas lokal dan inisiatif keberlanjutan oleh perusahaan pariwisata lokal didorong dan difasilitasi.	45	88	6	12
b.	Ada skema, dan dipromosikan, bagi pengunjung untuk mendukung komunitas lokal dan inisiatif keberlanjutan.	34	67	17	33
c.	Kesukarelawanan dan keterlibatan dengan masyarakat tidak melibatkan intrusi atau eksploitasi.	38	74	13	26
		117	76	36	24

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk memungkinkan dan mendorong perusahaan, pengunjung, dan masyarakat untuk berkontribusi pada komunitas dan inisiatif keberlanjutan secara bertanggung jawab.

2) Mencegah Eksploitasi dan Diskriminasi

Tabel 4-16

Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B5

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Referensi (judul, tanggal) untuk hukum khusus yang berkenaan dengan destinasi tentang hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan.	2	4	49	96
b.	Bukti komunikasi dan penegakan hukum di atas dan praktik baik terkait (termasuk untuk	2	4	49	96

	perusahaan pariwisata dan pengunjung).				
c.	Analisis risiko dan dampak terkait hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, perbudakan modern dan pekerja anak dilakukan secara teratur.	0	0	51	100
d.	Destinasi dan pemain pariwisata utama adalah penandatanganan Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata.	0	0	51	100
		4	3	150	97

Destinasi secara umum belum melaksanakan standar internasional tentang hak asasi manusia. Destinasi hanya sedikit memiliki hukum, praktik dan kode etik yang ditetapkan untuk mencegah dan melaporkan perdagangan manusia, perbudakan modern dan komersial, seksual, atau segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan terhadap atau terhadap siapa pun, terutama anak-anak, remaja, wanita, LGBT dan minoritas lain. Hukum dan praktik yang ditetapkan juga belum dikomunikasikan secara publik dan dilaksanakan.

3) Properti dan Hak Pengguna

Tabel 4-17
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B6

	Pernyataan	**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Referensi (judul, tanggal) untuk hukum khusus yang berkaitan dengan destinasi terkait hak properti dan akuisisi serta hak pengguna dan akses ke sumber daya.	2	4	49	96
b.	Referensi dalam hukum di atas untuk hak-hak komunal dan pribumi,	2	4	49	96

	konsultasi publik dan pemukiman kembali.				
c.	Bukti penegakan hukum di atas dalam konteks pengembangan dan kegiatan pariwisata.	0	0	51	100
d.	Bukti konsultasi masyarakat, persetujuan dan kompensasi	0	0	51	100
		4	3	150	97

Hukum dan peraturan tentang hak dan akuisisi properti belum banyak didokumentasikan dan dilaksanakan. Destinasi belum sepenuhnya mematuhi hak-hak komunal dan pribumi, memastikan konsultasi publik dan tidak mengizinkan pemukiman kembali tanpa persetujuan awal dan informasi dan kompensasi yang adil dan adil. Hukum dan peraturan juga belum sepenuhnya melindungi hak pengguna dan akses ke sumber daya utama.

4) Keselamatan dan Keamanan

Tabel 4-18
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B7

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Layanan keamanan dan kesehatan dibangun dengan baik dan aktif di destinasi	24	47	27	53
b.	Kebutuhan pengunjung diidentifikasi dan ditangani dalam pemberian layanan keamanan dan kesehatan.	21	41	30	59
c.	Fasilitas pariwisata diperiksa untuk memenuhi standar keselamatan dan kebersihan.	19	37	32	63
		64	42	89	58

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk memonitor, mencegah, melaporkan secara publik, dan menanggapi bahaya kejahatan, keselamatan, dan kesehatan yang memenuhi kebutuhan pengunjung dan penduduk.

5) Akses untuk Semua

Tabel 4-19
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator B8

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Adanya peraturan dan standar mengenai aksesibilitas tempat, fasilitas dan layanan pengunjung.	25	49	26	51
b.	Penerapan standar aksesibilitas yang konsisten di fasilitas publik.	0	0	51	100
c.	Data tentang tingkat/proporsi tempat dan fasilitas pengunjung yang dapat diakses.	0	0	51	100
d.	Bukti program untuk meningkatkan akses bagi orang-orang dengan berbagai kebutuhan akses.	0	0	51	100
e.	Informasi tentang aksesibilitas termasuk dalam komunikasi tentang destinasi secara keseluruhan.	0	0	51	100
f.	Rincian aksesibilitas termasuk dalam informasi pengunjung tentang tempat-tempat utama.	0	0	51	100
		25	8	281	92

Tempat, fasilitas dan layanan, termasuk yang penting bagi alam dan budaya, belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang cacat dan orang lain yang memiliki persyaratan akses khusus atau kebutuhan khusus lainnya. Jika tempat dan fasilitas tidak dapat diakses dengan segera, akses juga tidak diberikan melalui desain dan implementasi solusi yang mempertimbangkan integritas tempat tersebut dan akomodasi yang wajar untuk orang dengan

persyaratan akses yang dapat dicapai. Informasi juga belum sepenuhnya tersedia tentang aksesibilitas tempat, fasilitas dan layanan.

3. Keberlanjutan Budaya

a. Melindungi Warisan Budaya

1) Perlindungan Aset-Aset Budaya

Tabel 4-20
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C1

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Daftar aset budaya, termasuk evaluasi dan indikasi kerentanan.	6	12	45	88
b.	Program rehabilitasi dan konservasi aset.	17	33	34	67
c.	Mekanisme untuk menggunakan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset budaya.	13	26	38	74
		36	24	117	76

Destinasi secara umum belum memiliki kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi, dan melestarikan aset budaya, termasuk warisan budaya dan bentang budaya yang dibangun.

2) Artefak Budaya

Tabel 4-21
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C2

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Referensi ke hukum yang relevan yang berkaitan dengan artefak sejarah tentang destinasi (judul, tanggal).	6	12	45	88
b.	Bukti komunikasi hukum yang relevan dengan perusahaan pariwisata dan pengunjung.	17	33	34	67
c.	Bukti penegakan hukum yang relevan.	13	26	38	74

36	24	117	76

Destinasi secara umum belum memiliki hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau pemberian artefak bersejarah dan arkeologis yang tepat. Hukum tersebut belum ditegakkan dan dikomunikasikan kepada publik, termasuk kepada perusahaan pariwisata dan pengunjung.

3) Warisan Tak Berwujud

Tabel 4-22
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C3

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Identifikasi dan daftar warisan budaya tak berwujud.	0	0	51	100
b.	Contoh perayaan dan pengalaman pengunjung dari warisan budaya tak berwujud (acara, produk khas, dll.).	29	57	22	43
c.	Bukti keterlibatan masyarakat lokal dan pribumi dalam mengembangkan dan memberikan pengalaman pengunjung berdasarkan warisan budaya tak berwujud.	24	47	27	53
d.	Umpan balik dari pengunjung dan komunitas lokal tentang pengiriman pengalaman warisan tak berwujud.	12	24	39	76
		65	32	139	68

Destinasi belum sepenuhnya mendukung perayaan dan perlindungan warisan budaya tak berwujud, termasuk tradisi lokal, seni, musik, bahasa, keahlian memasak dan aspek lain dari identitas dan kekhasan lokal. Presentasi, replikasi, dan interpretasi budaya dan tradisi hidup belum dilakukan secara sensitif dan penuh hormat, belum banyak melibatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat, dan

juga belum memberi pengunjung pengalaman yang otentik dan asli.

4) Akses Tradisional

Tabel 4-23
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C4

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Pemantauan aksesibilitas ke situs alam dan budaya untuk masyarakat lokal.	17	33	34	67
b.	Bukti keterlibatan dengan komunitas lokal mengenai akses tradisional.	6	12	45	88
c.	Tindakan khusus untuk melindungi dan/atau merehabilitasi akses masyarakat lokal.	13	26	38	74
		36	24	117	76

Destinasi secara umum belum memonitor, melindungi, dan bila perlu merehabilitasi atau mengembalikan akses masyarakat lokal ke situs alam dan budaya.

5) Properti Intelektual

Tabel 4-24
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C5

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Rujukan ke hukum tentang kekayaan intelektual tentang destinasi (judul, tanggal).	6	12	45	88
b.	Komunikasi hak kekayaan intelektual kepada para pemangku kepentingan pariwisata.	13	26	38	74
c.	Bukti bahwa hak kekayaan intelektual dilindungi dalam pengembangan pengalaman budaya bagi pengunjung.	17	33	34	67
		36	24	117	76

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk berkontribusi pada perlindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu.

b. Mengunjungi Situs-Situs Budaya

1) Manajemen Pengunjung pada Situs-Situs Budaya

Tabel 4-25
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C6

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	*Monitoring* arus pengunjung dan dampak pada situs budaya, dengan hasilnya dibagikan di seluruh destinasi.	0	0	51	100
b.	Bukti tindakan untuk mengelola dampak terkait pariwisata di atau sekitar situs budaya.	0	0	51	100
c.	Keberadaan dan distribusi pedoman yang diterbitkan tentang perilaku pengunjung di situs sensitif dan acara budaya serta *monitoring* kepatuhan secara berkala.	3	6	48	94
d.	Kode praktik untuk operator tur dan pemandu wisata dan/atau keterlibatan mereka lainnya dalam manajemen pengunjung di situs budaya.	15	21	36	79
e.	Penyediaan pelatihan untuk panduan.	20	38	31	61
		38	15	217	85

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk pengelolaan pengunjung di dalam dan di sekitar situs-situs budaya, yang mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan sensitivitas mereka serta berupaya mengoptimalkan aliran pengunjung dan

meminimalkan dampak buruk. Pedoman untuk perilaku pengunjung di situs-situs sensitif dan acara-acara budaya juga belum sepenuhnya disediakan untuk pengunjung, operator tur dan pemandu sebelum dan pada saat kunjungan.

2) Interpretasi Situs

Tabel 4-26
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator C7

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Penyediaan bahan interpretatif informatif di situs dan dalam format yang dapat diakses sebelum kedatangan.	15	21	36	79
b.	Bukti bahwa bahan interpretatif telah diteliti dengan baik dan akurat.	0	0	51	100
c.	Bahan interpretasi yang mengidentifikasi signifikansi dan sensitivitas/kerapuhan situs.	3	6	48	94
d.	Bukti kolaborasi komunitas tuan rumah dalam persiapan bahan interpretatif yang relevan.	0	0	51	100
e.	Bahan interpretatif tersedia dalam bahasa yang relevan.	20	38	31	61
		38	15	217	85

Bahan interpretatif yang akurat yang menginformasikan pengunjung tentang pentingnya aspek budaya dan alam dari situs mereka mengunjungi belum sepenuhnya disediakan. Informasi tersebut belum sesuai secara budaya, belum dikembangkan dengan kolaborasi komunitas tuan rumah, dan belum dikomunikasikan dengan jelas dalam bahasa yang berkaitan dengan pengunjung dan penduduk.

4. Keberlanjutan Lingkungan

a. Konservasi Warisan Alam

1) Perlindungan Lingkungan Sensitif

Tabel 4-27

Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D1

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Daftar situs dan aset warisan alam, yang menunjukkan jenis, status konservasi dan kerentanan.	25	49	26	51
b.	Program untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan alam.	0	0	51	100
c.	Program untuk memberantas dan mengendalikan spesies invasif.	0	0	51	100
d.	Tindakan untuk mengidentifikasi, memantau dan memitigasi dampak pariwisata terhadap keanekaragaman hayati dan warisan alam.	0	0	51	100
e.	Mekanisme untuk menggunakan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset alam.	0	0	51	100
f.	Komunikasi dengan pengunjung dan perusahaan untuk mengurangi penyebaran spesies asing.	0	0	51	100
		25	8	281	92

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk memonitor, mengukur, dan merespons dampak pariwisata terhadap lingkungan alam, melestarikan ekosistem, habitat dan spesies, dan mencegah masuknya dan penyebaran spesies invasif.

2) Manajemen Pengunjung pada Situs Alami

Tabel 4-28
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D2

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	*Monitoring* arus pengunjung dan dampak pada situs alami, dengan hasil dibagikan di seluruh tujuan.	0	0	51	100
b.	Bukti tindakan untuk mengelola dan mengurangi dampak terkait pariwisata di atau sekitar situs alam.	0	0	51	100
c.	Keberadaan dan distribusi pedoman yang diterbitkan tentang perilaku pengunjung di situs sensitif, dan *monitoring* kepatuhan secara berkala.	0	0	51	100
d.	Kode praktik untuk operator tur dan pemandu wisata dan/atau keterlibatan lainnya dengan mereka tentang manajemen pengunjung di situs alami.	0	0	51	100
e.	Kerjasama dengan badan konservasi lokal untuk mengidentifikasi risiko lingkungan yang terkait dengan pariwisata dan langkah-langkah untuk menguranginya.	25	49	26	51
f.	Penyediaan pelatihan untuk panduan.	0	0	51	100
		25	8	281	92

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk pengelolaan pengunjung di dalam dan di sekitar situs alami, yang mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan sensitivitas mereka serta belum berupaya mengoptimalkan aliran pengunjung dan meminimalkan dampak buruk. Pedoman untuk

perilaku pengunjung di situs sensitif juga belum disediakan untuk pengunjung, operator tur dan pemandu sebelum dan pada saat kunjungan.

3) Interaksi Satwa Liar

Tabel 4-29
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D3

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Referensi (judul, tanggal) untuk hukum internasional, nasional dan lokal yang berlaku di destinasi mengenai interaksi dengan satwa liar.	0	0	51	100
b.	Pengesahan standar internasional pengamatan satwa liar untuk spesies laut dan darat.	0	0	51	100
c.	Distribusi kode praktik interaksi satwa liar, termasuk pengamatan, yang mencerminkan standar internasional.	0	0	51	100
d.	Sistem untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, dan kode praktik di antara operasi pariwisata.	0	0	51	100
e.	Tindakan untuk memonitor kesejahteraan satwa liar dan meminimalkan gangguan, di lokasi di mana terjadi interaksi.	0	0	51	100
f.	Penyediaan informasi kepada pengunjung tentang interaksi satwa liar yang berbahaya, seperti menyentuh dan memberi makan.	43	82	8	18
		43	14	263	86

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar lokal, nasional, dan internasional untuk

interaksi satwa liar. Interaksi dengan satwa liar bebas jelajah belum sepenuhnya dikelola dengan mempertimbangkan dampak kumulatif, bersifat non-invasif dan secara bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk pada hewan yang bersangkutan dan pada kelayakan dan perilaku populasi di alam liar.

4) Eksploitasi Spesies dan Kesejahteraan Hewan

Tabel 4-30
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D4

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Referensi (judul, tanggal) hukum internasional, nasional dan lokal tertentu, standar dan pedoman yang berlaku di tujuan mengenai kesejahteraan hewan dan konservasi spesies.	0	0	51	100
b.	Pemberitahuan hukum, standar dan pedoman untuk perusahaan pariwisata dan panduan.	0	0	51	100
c.	Sistem inspeksi kondisi satwa liar dan hewan peliharaan yang ditangkap, termasuk tempat tinggal dan penanganannya.	0	0	51	100
d.	Perizinan dan pengecekan kualifikasi personel yang bertanggung jawab atas satwa liar yang ditangkap.	0	0	51	100
e.	Tindakan untuk mempromosikan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) di sektor pariwisata dan untuk memastikan kepatuhan terhadapnya.	0	0	51	100
f.	Pemberian informasi kepada pengunjung tentang menghindari	0	0	51	100

	perdagangan spesies yang terancam punah, mis. dalam pembelian suvenir yang berasal dari spesies satwa liar yang terancam yang dilaporkan oleh IUCN atau CITES.				
g.	Penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perburuan adalah bagian dari pendekatan konservasi, berbasis ilmiah, dan ditegakkan dengan ketat.	0	0	51	100
		0	0	357	100

Destinasi secara umum belum memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar lokal, nasional, dan internasional yang berupaya memastikan kesejahteraan hewan dan konservasi spesies (hewan, tumbuhan, dan semua organisme hidup). Ini termasuk pemanenan atau penangkapan, perdagangan, pameran, dan penjualan spesies satwa liar dan produk-produknya. Masih ada spesies hewan liar yang diperoleh, dibesarkan atau ditahan, kecuali oleh orang yang berwenang dan sesuai dan untuk kegiatan yang diatur dengan benar. Perumahan, perawatan dan penanganan semua liar dan hewan domestik juga belum memenuhi standar kesejahteraan hewan tertinggi.

b. Manajemen Sumberdaya

1) Konservasi Energi

Tabel 4-31
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D5

	Pernyataan	**Ketersediaan**			
		Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a.	Target konsumsi energi dipublikasikan dan dipromosikan.	0	0	51	100
b.	Program untuk meningkatkan efisiensi energi, mis.	0	0	51	100

	mempromosikan dan mendukung penyekatan.				
c.	Investasi dalam energi terbarukan dan persen dari total penyediaan/konsumsi.	0	0	51	100
d.	Dukungan dan insentif untuk pemantauan dan pengurangan energi oleh perusahaan	0	0	51	100
		0	0	204	100

Destinasi secara umum belum memiliki target untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi dalam penggunaannya, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Destinasi juga belum memiliki sistem untuk mendorong perusahaan mengukur, memonitor, mengurangi, dan melaporkan kontribusi mereka secara terbuka kepada target-target ini.

2) Pelayanan Air

Tabel 4-32
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D6

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Penyediaan panduan dan dukungan untuk *monitoring* dan pengurangan penggunaan air oleh perusahaan.	0	0	51	100
b.	Program untuk secara teratur menilai risiko air.	0	0	51	100
c.	Pengaturan, publikasi dan penegakan tujuan pelayanan air, ketika risiko air telah dinilai tinggi.	0	0	51	100
d.	*Monitoring* dan pengendalian sumber dan volume air yang digunakan untuk tujuan pariwisata dan pengaruhnya terhadap masyarakat lokal dan ekosistem.	0	0	51	100
e.	Promosi dan pengecekan kepatuhan terhadap tujuan	0	0	51	100

	oleh perusahaan pariwisata.				
f.	Informasi pengunjung tentang risiko air dan meminimalkan penggunaan air	0	0	51	100
		0	0	306	100

Destinasi secara umum belum mendorong perusahaan untuk mengukur, memonitor, melaporkan secara publik, dan mengelola penggunaan air. Risiko air di destinasi belum dinilai dan didokumentasikan. Dalam kasus risiko air yang tinggi, tujuan pengelolaan air belum diidentifikasi dan juga belum secara aktif dikejar dengan perusahaan, untuk memastikan bahwa penggunaan pariwisata tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan ekosistem.

3) Kualitas Air

Tabel 4-33

Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D7

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Program *monitoring* kualitas air.	0	0	51	100
b.	Adanya data dan laporan tentang kualitas air.	0	0	51	100
c.	*Monitoring* air mandi, dengan sertifikasi dan identifikasi situs-situs yang mencapai standar yang ditetapkan.	0	0	51	100
d.	Bukti tindakan untuk meningkatkan kualitas air.	0	0	51	100
e.	Informasi bagi pengunjung tentang kualitas air minum lokal, untuk mendorong penggunaan sebagai alternatif air kemasan.	0	0	51	100
		0	0	255	100

Destinasi secara umum belum memonitor kualitas air untuk keperluan minum, rekreasi dan ekologi menggunakan standar kualitas. Hasil *monitoring* juga belum tersedia untuk umum, dan

destinasi belum memiliki sistem untuk menanggapi secara tepat waktu masalah kualitas air.

c. Manajemen Limbah dan Emisi

1) Air Limbah

Tabel 4-34
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D8

Pernyataan	Ketersediaan			
	Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a. Pedoman dan peraturan tertulis tentang pengolahan air limbah.	51	100	0	0
b. Sistem pedoman penegakan di antara perusahaan.	0	0	51	100
c. *Monitoring*/pengujian air limbah yang dikeluarkan.	0	0	51	100
d. Penyediaan sistem pengolahan air kota yang berkelanjutan, untuk digunakan oleh sektor pariwisata, yang praktis dan sesuai.	0	0	51	100
	51	25	153	75

Destinasi secara umum belum memiliki pedoman yang jelas dan dilaksanakan untuk penentuan lokasi, pemeliharaan, dan pengujian pembuangan dari *septic tank* dan sistem pengolahan air limbah. Destinasi juga belum memastikan bahwa limbah diperlakukan dengan baik dan digunakan kembali atau dilepaskan dengan aman tanpa dampak buruk pada populasi lokal dan lingkungan.

2) Limbah Padat

Tabel 4-35
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D9

Pernyataan	Ketersediaan			
	Ada	**%**	**Tidak**	**%**
a. Program *monitoring* limbah, dengan hasil dan target diterbitkan.	21	41	30	59
b. Kampanye/saran/dukungan terkoordinasi dengan perusahaan pariwisata dalam	11	22	40	78

	manajemen limbah, termasuk limbah makanan.				
c.	Kampanye untuk mengurangi/menghilangkan item sekali pakai, terutama plastik.	51	100	0	0
d.	Program manajemen limbah untuk kantor dan fasilitas publik.	0	0	51	100
e.	Penyediaan sistem pengumpulan dan daur ulang, dengan setidaknya empat aliran (yaitu organik, kertas, logam, gelas dan plastik).	0	0	51	100
f.	Penyediaan sistem berkelanjutan untuk pembuangan limbah sisa.	0	0	51	100
g.	Kampanye untuk menghilangkan menjatuhkan sampah, termasuk oleh pengunjung, dan untuk menjaga ruang publik tetap bersih.	51	100	0	0
h.	Tempat sampah yang memadai untuk pembuangan limbah terpisah.	41	80	10	20
		175	43	233	57

Destinasi secara umum belum mengukur dan melaporkan limbah yang dihasilkan dan menetapkan target untuk pengurangannya. Destinasi belum memastikan limbah padat diolah dan dialihkan dengan benar dari TPA, dengan penyediaan sistem pengumpulan dan daur ulang multi-aliran yang secara efektif memisahkan limbah berdasarkan jenis. Destinasi belum mendorong perusahaan untuk menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah padat, termasuk limbah makanan. Belum ada tindakan diambil untuk menghilangkan atau mengurangi item sekali pakai, terutama plastik. Setiap sisa limbah padat yang tidak digunakan kembali atau didaur ulang juga belum dibuang dengan aman dan berkelanjutan

3) Emisi Gas Rumah Kaca dan Mitigasi Perubahan Iklim

Tabel 4-36
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D10

Pernyataan		Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Target yang dipublikasikan untuk persentase pengurangan emisi berdasarkan tanggal yang ditentukan.	15	21	36	79
b.	Laporan iklim tahunan, termasuk *monitoring* dan tindakan mitigasi.	0	0	51	100
c.	Kampanye yang didukung atau keterlibatan lain dengan perusahaan pariwisata mengenai pengurangan dan mitigasi emisi.	3	6	48	94
d.	Tindakan untuk mengurangi emisi dari operasi sektor publik.	20	38	31	61
e.	Informasi untuk perusahaan dan pengunjung tentang skema ganti rugi yang memenuhi standar yang diakui.	0	0	51	100
		38	15	217	85

Destinasi secara umum belum memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengimplementasikan serta melaporkan kebijakan dan tindakan mitigasi. Perusahaan belum didorong untuk mengukur, memonitor, mengurangi atau meminimalkan, secara terbuka melaporkan dan memitigasi emisi gas rumah kaca dari semua aspek operasi (termasuk dari pemasok dan penyedia layanan). Ganti rugi setiap emisi yang tersisa juga belum didorong.

4) Transportasi Berdampak Rendah

Tabel 4-37
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D11

	Pernyataan	Ketersediaan			
		Ada	%	Tidak	%
a.	Investasi dalam infrastruktur transportasi yang lebih berkelanjutan, termasuk transportasi umum dan kendaraan rendah emisi.	21	41	30	59
b.	Informasi dipromosikan kepada pengunjung tentang opsi transportasi alternatif ke dan dalam tujuan	11	22	40	78
c.	Data tentang pengunjung menggunakan moda transportasi alternatif.	0	0	51	100
d.	Peningkatan dan promosi peluang bersepeda dan berjalan kaki.	51	100	0	0
e.	Prioritas pasar pengunjung dapat diakses dengan opsi transportasi pendek dan lebih berkelanjutan.	0	0	51	100
f.	Sektor publik dan perusahaan pariwisata memprioritaskan transportasi berdampak rendah dalam operasinya.	0	0	51	100
		83	27	223	73

Destinasi secara umum belum memiliki target untuk mengurangi emisi transportasi dari perjalanan ke dan di dalam destinasi. Tetapi peningkatan penggunaan kendaraan yang rendah emisi rendah, transportasi umum dan perjalanan aktif (mis. berjalan kaki dan bersepeda) sudah dilakukan untuk mengurangi kontribusi pariwisata terhadap polusi udara, kemacetan dan perubahan iklim.

5) Polusi Cahaya dan Suara

Tabel 4-38
Tanggapan Terhadap Pernyataan Indikator D12

Pernyataan	Ketersediaan			
	Ada	%	Tidak	%
a. Pedoman polusi cahaya dan suara diproduksi dan dipromosikan ke perusahaan pariwisata.	0	0	51	100
b. Identifikasi dan *monitoring* sumber potensial polusi cahaya dan suara terkait dengan pariwisata.	0	0	51	100
c. Mekanisme untuk memungkinkan penghuni melaporkan polusi cahaya dan suara, dengan tindak lanjut.	0	0	51	100
	0	0	153	100

Destinasi secara umum belum memiliki pedoman dan peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara. Destinasi juga belum mendorong perusahaan untuk mengikuti pedoman dan peraturan ini.

C. PEMBAHASAN

Pemenuhan Kriteria Destinasi GSTC untuk bagian pertama, manajemen berkelanjutan, secara keseluruhan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4-39, di mana hampir semua indikator menunjukkan bahwa destinasi Kepulauan Seribu belum memenuhi standar. Hanya indikator keterlibatan dan umpan balik dan promosi dan informasi yang sudah memenuhi standar.

Tabel 4-39
Pemenuhan Standar Kriteria Manajemen Berkelanjutan

Bagian	Kriteria	Indikator	Status Pemenuhan Standar
Manajemen Berkelanjutan	Struktur dan kerangka manajemen	• Tanggung-jawab manajemen destinasi	• Belum memenuhi standar

		• Strategi manajemen destinasi dan rencana tindakan • *Monitoring* dan pelaporan	• Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar
	Keterlibatan *stakeholder*	• Keterlibatan perusahaan dan standar keberlanjutan • Keterlibatan penduduk dan umpan balik • Keterlibatan pengunjung dan umpan balik • Promosi dan informasi	• Belum memenuhi standar • Sudah memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Sudah memenuhi standar
	Mengelola tekanan dan perubahan	• Mengelola volume dan kegiatan pengunjung • Merencanakan regulasi dan kontrol pembangunan • Adaptasi perubahan iklim • Manajemen risiko dan krisis	• Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Sudah memenuhi standar

Destinasi Kepulauan Seribu belum memiliki unit organisasi pemerintah daerah secara khusus yang bertanggung-jawab untuk menerapkan pendekatan terkoordinasi untuk pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan hanya dapat diimplementasikan melalui partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk organisasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung-jawab, pengawasan, dan kapabilitas implementasi yang jelas untuk bisa mengelola masalah sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan. Organisasi tersebut juga harus memiliki dana yang memadai, mampu bekerja-sama dengan berbagai badan dan lembaga terkait, memiliki pegawai yang berpengalaman dalam mengelola pariwisata keberlanjutan dan menjunjung tinggi transparansi

dalam setiap kegiatannya. Ketiadaan organisasi menyebabkan destinasi tidak memiliki strategi manajemen yang dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Destinasi perlu memiliki strategi yang mencakup identifikasi dan penilaian aset pariwisata serta mempertimbangkan masalah dan risiko sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan. Destinasi harus memiliki sistem yang dapat memonitor dan menanggapi masalah sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan dan dampak yang timbul dari pariwisata. Tindakan yang merupakan tanggapan harus dievaluasi dan dilaporkan kepada publik secara berkala. Destinasi telah menginformasikan pengelola wisata tentang masalah keberlanjutan serta mendorong dan mendukung pengelola wisata menerapkan pariwisata berkelanjutan. Destinasi sudah mempromosikan penerapan standar keberlanjutan, mempromosikan penerapan standar yang diakui GSTC-I dan skema sertifikasi terakreditasi GSTC-I untuk perusahaan pariwisata tetapi belum sampai pada kegiatan sertifikasi. Destinasi sudah memperkenankan adanya partisipasi publik dalam perencanaan dan manajemen destinasi berkelanjutan tidak semua tindakan yang diambil merupakan tanggapan terhadap partisipasi tersebut. Destinasi melakukan pengukuran kepuasan pengunjung tetapi belum memiliki sistem untuk memonitor dan melaporkan secara publik kepuasan pengunjung terhadap kualitas dan keberlanjutan pengalaman destinasi. Materi promosi dan informasi pengunjung tentang destinasi secara umum sudah tersedia meskipun belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan pendekatan destinasi terhadap keberlanjutan. Destinasi perlu memiliki sistem untuk memonitor dan mengelola volume dan kegiatan pengunjung, dan untuk mengurangi atau meningkatkan volume dan kegiatan pengunjung pada

waktu-waktu tertentu dan di lokasi tertentu seimbang dengan kebutuhan ekonomi lokal, masyarakat, warisan budaya, dan lingkungan. Destinasi perlu memiliki pedoman perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan terkait penggunaan lahan berkelanjutan, desain, konstruksi, pembongkaran, penyewaan properti dan konsesi agar sesuai dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya. Pedoman, peraturan dan kebijakan juga harus melibatkan partisipasi publik dan disosialisasikan secara luas. Destinasi harus memiliki strategi adaptasi perubahan iklim yang mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Informasi tentang prediksi perubahan iklim, risiko terkait, dan kondisi masa depan juga harus disediakan untuk pengelola wisata dan pengunjung. Destinasi perlu membuat rencana tanggap darurat untuk mengurangi risiko dan krisis. Rencana ini perlu dilengkapi dan prosedur serta disosialisasikan kepada pengelola wisata dan masyarakat.

Pemenuhan Kriteria Destinasi GSTC untuk bagian kedua, dampak sosial-ekonomi, secara keseluruhan sebagian masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4-40, di mana sebagian indikator menunjukkan bahwa destinasi Kepulauan Seribu belum memenuhi standar. Indikator-indikator yang memenuhi standar terdiri dari mengukur kontribusi ekonomi dari pariwisata, peluang kerja dan karier yang layak, mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil, dan mendukung masyarakat.

Tabel 4-40
Pemenuhan Standar Kriteria Keberlanjutan Sosial-Ekonomi

Bagian	Kriteria	Indikator	Status Pemenuhan Standar
Keberlanjutan Sosial-Ekonomi	Pemberian manfaat ekonomi lokal	• Mengukur kontribusi ekonomi dari pariwisata • Peluang kerja dan karier yang layak	• Sudah memenuhi standar • Sudah memenuhi standar

		• Mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil	• Sudah memenuhi standar
	Kesejahteraan dan dampak sosial	• Mendukung masyarakat • Menghindari eksploitasi dan diskriminasi • Properti dan hak-hak pengguna • Keselamatan dan keamanan • Akses untuk semua	• Sudah memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar

Pariwisata Kepulauan Seribu sangat berkontribusi ekonomi baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi destinasi. Namun demikian kontribusi tersebut belum sepenuhnya dimonitor dan dilaporkan ke publik. Pengukuran kontribusi yang sudah dilakukan mencakup tingkat investasi, pekerjaan yang diciptakan, serta volume dan pengeluaran pengunjung. Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait juga telah mendorong dan mendukung peluang karier dan pelatihan yang relevan dengan pengembangan bidang pariwisata. Pengelola wisata di Kepulauan Seribu juga telah berkomitmen untuk menyediakan kesetaraan kesempatan, pelatihan, lingkungan kerja yang aman dan terjamin, serta pendapatan yang mencukupi untuk pekerja lokal. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal dengan mendukung keberadaan pengusaha lokal dan investasi berkelanjutan. Pengusaha wisata juga selalu berusaha mempromosikan pengembangan dan pembelian produk yang dihasilkan oleh penduduk dan pengusaha lokal berdasarkan pada prinsip-prinsip

perdagangan yang adil. Namun demikian destinasi perlu memiliki sistem untuk dapat memotivasi perusahaan, pengunjung, dan masyarakat untuk berkontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Destinasi juga harus menginisiasi pelaksanaan standar internasional mengenai hak asasi manusia. Sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur pelarangan perdagangan manusia, perbudakan modern dan komersial, seksual, atau segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan tetapi sosialisasi lebih lanjut tentang hal ini kepada pengelola wisata dan penduduk lokal perlu lebih diintensifkan. Berbagai permasalahan mengenai jual-beli properti yang terjadi di Kepulauan Seribu mengindikasikan bahwa destinasi belum sepenuhnya mematuhi hak-hak komunal dan pribumi. Akuisisi properti hendaknya didahului dengan konsultasi publik dan harus ada kompensasi yang adil bagi pemilik properti yang diakuisisi. Hak pengguna dan akses ke sumber daya utama juga perlu dilindungi oleh hukum dan peraturan. Destinasi harus segera memiliki sistem yang dapat memonitor dan mencegah segala hal yang membahayakan keselamatan, dan kesehatan pengunjung dan penduduk lokal. Destinasi juga perlu menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang memungkinkan akses bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan orang lain yang memiliki kebutuhan khusus. Informasi tentang aksesibilitas tempat, fasilitas dan layanan juga harus selalu tersedia dan *update*.

Pemenuhan Kriteria Destinasi GSTC untuk bagian ketiga, keberlanjutan budaya, secara keseluruhan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4-41, di mana semua indikator menunjukkan bahwa destinasi Kepulauan Seribu belum memenuhi standar. Tidak ada satu pun indikator yang memenuhi standar.

Tabel 4-41
Pemenuhan Standar Kriteria Keberlanjutan Budaya

Bagian	Kriteria	Indikator	Status Pemenuhan Standar
Keberlanjutan Budaya	Melindungi warisan budaya	• Perlindungan aset-aset budaya	• Belum memenuhi standar
		• Artefak budaya	• Belum memenuhi standar
		• Warisan tak berwujud	• Belum memenuhi standar
		• Akses tradisional	• Belum memenuhi standar
		• Properti intelektual	• Belum memenuhi standar
	Mengunjungi situs budaya	• Manajemen pengunjung pada situs budaya	• Belum memenuhi standar
		• Interpretasi situs	• Belum memenuhi standar

Sebagian pulau di Kepulauan Seribu merupakan tempat yang kaya akan aset-aset budaya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi, dan melestarikan aset budaya. Sebagian pulau dengan merupakan tempat penemuan artefak bersejarah dan arkeologis. Penjualan, perdagangan, pameran, atau pemberian artefak-artefak tersebut harus diatur oleh hukum secara ketat dan peraturannya harus disosialisasikan kepada pengelola wisata dan pengunjung. Sebagian pulau terutama pulau penduduk, memiliki penduduk lolak yang menjunjung tinggi warisan budaya dalam bentuk tradisi, seni, musik, bahasa, keahlian memasak dan aspek lain yang merupakan identitas dan kekhasan lokal. Warisan budaya ini perlu dihormati dan dijaga kelestariannya. Warisan budaya ini juga dapat dijadikan bagian dari pengembangan wisata budaya yang perlu banyak melibatkan

penduduk lokal sehingga dapat memberi pengunjung pengalaman yang otentik dan asli dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Akses penduduk lokal ke situs alam dan budaya juga harus dilindungi dan direhabilitasi apabila akses tidak ada. Hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu yang digunakan dalam pengembangan pariwisata perlu selalu dilindungi dan dilestarikan. Agar kelestarian situs-situs budaya tetap terjaga, destinasi harus memiliki sistem pengelolaan pengunjung yang dapat mengoptimalkan aliran pengunjung dan meminimalkan dampak buruk. Untuk itu destinasi perlu membuat dan mensosialisasikan pedoman perilaku bagi pengunjung, operator tur, dan pemandu sebelum dan pada saat kunjungan. Informasi mengenai pentingnya aspek budaya dan alam dari situs perlu disediakan untuk pengunjung. Informasi tersebut harus dikembangkan dengan melibatkan penduduk lokal .

Pemenuhan Kriteria Destinasi GSTC untuk bagian keempat, keberlanjutan lingkungan, secara keseluruhan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4-42 di mana semua indikator menunjukkan bahwa destinasi Kepulauan Seribu belum memenuhi standar. Tidak ada satu pun indikator yang memenuhi standar.

Tabel 4-42
Pemenuhan Standar Kriteria Keberlanjutan Lingkungan

Bagian	Kriteria	Indikator	Status Pemenuhan Standar
Keberlanjutan Lingkungan	Konservasi warisan alam	• Perlindungan lingkungan sensitif • Manajemen pengunjung pada situs alam • Interaksi satwa liar • Eksploitasi spesies dan kesejahteraan hewan	• Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar

	Manajemen sumberdaya	• Konservasi energi • Pengelolaan air • Kualitas air	• Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar
	Manajemen limbah dan emisi	• Air limbah • Limbah padat • Emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim • Mitigasi • Transportasi berdampak rendah • Polusi cahaya dan suara	• Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar • Belum memenuhi standar

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem, habitat dan spesies. Oleh karena itu destinasi harus memiliki sistem untuk memonitor, mengukur, dan merespons dampak pariwisata. Pengunjung perlu dikelola dan dioptimalkan alirannya sehingga bisa meminimalkan dampak buruk dari pariwisata. Pedoman perilaku juga harus disediakan untuk pengunjung, operator tur dan pemandu sebelum dan pada saat kunjungan. Beberapa pulau di Kepulauan Seribu menawarkan wisata bawah air yang mengandalkan pada keindahan terumbu karang dan ikan warna-warni. Agar kelangsungannya terjaga, destinasi harus memiliki sistem yang dapat memastikan kepatuhan pengunjung terhadap hukum dan standar lokal, nasional, dan internasional ketika melakukan interaksi dengan satwa liar sehingga dampak buruk kumulatif terhadap hewan yang bersangkutan dan perilakunya di alam liar.

Kesejahteraan hewan dan konservasi spesies (hewan, tumbuhan, dan semua organisme hidup) harus dijaga agar sesuai dengan hukum dan standar lokal, nasional, dan internasional. Pengelola wisata, penduduk lokal, dan pengunjung tidak dapat semaunya melakukan pemanenan atau penangkapan, perdagangan, pameran, dan penjualan spesies satwa liar dan produk-produknya. Kalau pun ada spesies hewan liar yang dapat ditangkap, penangkapannya harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan sesuai dan untuk kegiatan yang diatur dengan benar. Perumahan, perawatan dan penanganan semua hewan liar juga harus memenuhi standar kesejahteraan hewan sesuai hukum dan standar lokal, nasional, dan internasional. Destinasi juga perlu mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi energi atau meningkatkan efisiensi penggunaannya. Target-target efisiensi penggunaan energi harus diukur dan dimonitor. Destinasi juga harus mendorong pengelola wisata untuk menghemat penggunaan air agar air tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan ekosistem. Kualitas air juga harus selalu dimonitor menggunakan standar kualitas. Hasil monitoring digunakan untuk mengatasi masalah kualitas air. Pedoman mengenai penentuan lokasi, pemeliharaan, dan pengujian pembuangan, pengolahan air limbah harus tersedia dan disosialisasikan dengan baik. Limbah harus diperlakukan dengan baik dan digunakan kembali atau dilepaskan dengan aman tanpa menimbulkan dampak buruk kepada populasi lokal dan lingkungan. Limbah padat termasuk limbah makanan harus diolah dan dialihkan dengan benar dari tempat pembuangan akhir. Destinasi harus memotivasi pengelola wisata untuk menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah padat, termasuk limbah makanan sedangkan sisa limbah padat yang

tidak digunakan kembali atau didaur ulang harus dibuang dengan aman. Penggunaan item sekali pakai terutama plastik harus dihilangkan atau dikurangi. Pengelola wisata harus dimotivasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempersiapkan diri untuk tindakan mitigasi. Jika pengelola wisata tidak berhasil mencapai target emisi maka harus ada mekanisme ganti rugi untuk setiap emisi yang tersisa. Penyelenggara layanan transportasi juga harus didorong untuk mengurangi emisi transportasi pada perjalanan ke dan di dalam destinasi. Semua ini dilakukan untuk mengurangi kontribusi pariwisata terhadap polusi udara, dan perubahan iklim. Pedoman dan peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara juga harus tersedia dan destinasi harus mendorong pengelola wisata untuk mengikuti pedoman dan peraturan ini.

Pariwisata keberlanjutan di Kepulauan Seribu adalah tentang keseimbangan antara kepentingan ekologis, ekonomi dan sosial. Di satu sisi, penting untuk berkembang selaras dengan alam dan manusia, namun tetap otentik dan hemat energi. Di sisi lain, keberlanjutan ekonomi berarti bahwa investasi yang dilakukan hari ini harus tetap berfungsi pada generasi mendatang, dalam jangka panjang. Keberlanjutan dalam praktik berarti menciptakan jaringan pengelolaan wisata yang bergerak di bidang ekonomi berkelanjutan dan bersama-sama mempromosikan kesadaran lingkungan.

Pariwisata berkelanjutan juga berarti menjadikan destinasi sebagai lingkungan yang layak huni di masa depan, sementara pada saat yang sama melindungi alam, untuk setidaknya 20 atau 30 tahun ke depan. Namun, banyak komunitas lokal Kepulauan Seribu terjebak dalam cara berpikir lama ini di mana satu-satunya cara untuk mengembangkan destinasi adalah dengan membangun infrastruktur besar untuk pariwisata. Kelompok-kelompok ini sama sekali tidak

menyadari perubahan iklim yang membuat pariwisata semakin tidak menguntungkan. Penggunaan yang cermat dan perlindungan sumber daya alam yang penting adalah aspek penting dari pariwisata berkelanjutan. Ini dapat dicapai melalui pengembangan pariwisata menggunakan energi terbarukan, menggunakan gas alam untuk menggerakkan transportasi umum, dan transportasi umum yang dapat meminimalkan polusi. Selain itu, langkah-langkah peningkatan kesadaran sangat penting: apakah itu tentang rambu-rambu wisata agar para wisatawan lebih memahami dan menghargai alam, atau tentang konseling tentang efisiensi energi untuk hotel dan penginapan, pekerjaan hubungan masyarakat dan komunikasi adalah bagian penting dari pariwisata berkelanjutan. Untuk itu keberlanjutan bukan hanya konsep sukarela tetapi kewajiban dan misi utama. Indikator pariwisata berkelanjutan tingkat internasional adalah bagian yang sangat penting dari kebijakan pariwisata berkelanjutan, tidak seperti komunitas lokal, yang kadang-kadang tidak membutuhkan indikator, dan kadang-kadang tidak memiliki sumber daya untuk mengumpulkan dan menggunakan data.

Pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dimulai dari bawah ke atas dan bukan dari atas ke bawah. Dimulai dengan kedatangan wisatawan, di mana mobilitas berkelanjutan memainkan peran penting, berlanjut dengan akomodasi, di mana sumber daya harus dilestarikan dalam proses penyediaan layanan, dan berlanjut ke makanan dan produk regional. Semua proses ini mencakup berbagai jenis pemangku kepentingan. Integrasi pemangku kepentingan sangat penting untuk mengembangkan produk pariwisata berkelanjutan berkualitas tinggi. Dengan cara ini, seluruh jaringan pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat dari produk pariwisata baru dan menciptakan

kawasan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kepulauan Seribu telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari utama di Indonesia yang menawarkan keindahan alam pulau, pantai, dan alam bahwa lautnya. Wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Umumnya wisatawan datang berkunjung ke pulau resor, pulau hunian, dan pulau cagar budaya untuk melihat keindahan alam. Keindahan alam yang menjadi andalan Kepulauan Seribu tidak boleh rusak dan harus senantiasa terpelihara. Upaya menjadikan pariwisata di Kepulauan Seribu sebagai sektor unggulan harus dibarengi dengan upaya melestarikan lingkungan. Pemerintah, pengelola wisata dan penduduk lokal tidak boleh hanya memikirkan investasi jangka pendek yaitu mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya tetapi juga harus memikirkan investasi jangka panjang yaitu melestarikan lingkungan supaya sumber penghasilan tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai destinasi wisata yang mengandalkan pada keindahan alam, Kepulauan Seribu perlu mengubah orientasinya dengan menerapkan pariwisata berkelanjutan di mana destinasi berupaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan sekaligus tetap aktif menjaga kelestarian lingkungan.

Penerapan pariwisata berkelanjutan di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Tetapi karena destinasi Kepulauan Seribu hendak dikembangkan menjadi destinasi wisata kelas dunia maka Kepulauan

Seribu juga harus menerapkan kriteria berstandar internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Kriteria destinasi GSTC, dikenal secara informal juga sebagai GSTC-D, adalah jumlah minimum yang harus dicapai oleh destinasi wisata di mana pun. Kriteria GSTC telah dikembangkan dan direvisi sambil berusaha untuk mematuhi Standard-Setting Code of the ISEAL Alliance, sebuah badan yang diakui untuk memberikan panduan tentang norma-norma internasional untuk mengembangkan standar keberlanjutan di semua sektor.

Untuk menilai apakah suatu destinasi wisata telah menerapkan standar internasional, GSTC mengembangkan instrumen dengan 4 bagian yang terdiri dari manajemen berkelanjutan, sosial-ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Masing-masing bagian dikembangkan menjadi beberapa kriteria dan indikator.

Dari hasil analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan destinasi Kepulauan Seribu belum menerapkan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan standar internasional yang dikembangkan oleh GSTC. Hanya beberapa indikator yang telah memenuhi standar, dan itu pun sebagian besar belum sepenuhnya memenuhi standar.

Indikator-indikator pariwisata berkelanjutan di Kepualan Seribu yang sudah memenuhi standar internasional terdiri dari:

1. Manajemen berkelanjutan.
    a. Keterlibatan *stakeholder*.
        - Keterlibatan penduduk dan umpan balik.
        - Promosi dan informasi.
    b. Mengelola tekanan dan perubahan.
        - Manajemen risiko dan krisis.
2. Keberlanjutan sosial budaya.
    a. Pemberian manfaat ekonomi lokal.

- Mengukur kontribusi ekonomi dari pariwisata.
- Peluang kerja dan karier yang layak.
- Mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil.

b. Kesejahteraan dan dampak sosial.
- Mendukung masyarakat.

Indikator-indikator pariwisata berkelanjutan yang belum memenuhi standar internasional terdiri dari:

1. Manajemen berkelanjutan.
   a. Struktur dan kerangka manajemen.
      - Tanggung-jawab manajemen destinasi.
      - Strategi manajemen destinasi dan rencana tindakan.
      - *Monitoring* and pelaporan.
   b. Keterlibatan *stakeholder*.
      - Keterlibatan perusahaan dan standar keberlanjutan.
      - Keterlibatan pengunjung dan umpan balik.
   c. Mengelola tekanan dan perubahan.
      - Mengelola volume dan kegiatan pengunjung.
      - Merencanakan regulasi dan kontrol pembangunan.
      - Adaptasi perubahan iklim.
2. Keberlanjutan sosial budaya.
   a. Kesejahteraan dan dampak sosial.
      - Mendukung masyarakat.
      - Menghindari eksploitasi dan diskriminasi.
      - Properti dan hak-hak pengguna.
      - Keselamatan dan keamanan.
      - Akses untuk semua.
3. Keberlanjutan budaya.
   a. Melindungi warisan budaya.
      - Perlindungan aset-aset budaya.
      - Artefak budaya.

- Warisan tak berwujud.
- Akses tradisional.
- Properti intelektual.

b. Mengunjungi situs budaya.
   - Manajemen pengunjung pada situs budaya.
   - Interpretasi situs.

4. Keberlanjutan lingkungan.
   a. Konservasi warisan alam.
      - Perlindungan lingkungan sensitif.
      - Manajemen pengunjung pada situs alam.
      - Interaksi satwa liar.
      - Eksploitasi spesies dan kesejahteraan hewan.
   b. Manajemen sumberdaya.
      - Konservasi energi.
      - Pengelolaan air.
      - Kualitas air.
   c. Manajemen limbah dan emisi.
      - Air limbah.
      - Limbah padat.
      - Emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.
      - Mitigasi.
      - Transportasi berdampak rendah.
      - Polusi cahaya dan suara.

B. Saran

1. Untuk memenuhi standar manajemen berkelanjutan, destinasi Kepulauan Seribu sebaiknya melakukan perbaikan struktur dan kerangka manajemen melalui peningkatan tanggung-jawab manajemen; penerapan strategi dan rencana aksi, *monitoring*, dan pelaporan; melibatkan *stakeholder* (pemerintah, pengelola wisata, penduduk, dan pengunjung); mengelola volume dan kegiatan pengunjung; membuat berbagai regulasi dan kebijakan; menerapkan

strategi adaptasi iklim, serta menerapkan manajemen krisis dan risiko.

2. Untuk memenuhi standar keberlanjutan sosial ekonomi, destinasi Kepulauan Seribu sebaiknya melakukan pengukuran kontribusi pariwisata terhadap ekonomi secara berkala; memberikan peluang karier dan pelatihan kepada penduduk lokal; mendukung pengusaha lokal; menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, serta mencegah kegiatan-kegiatan yang bersifat eksploitasi, diskriminasi, dan melanggar hak-hak masyarakat; dan menyediakan akses fasilitas dan layanan untuk semua orang termasuk pengunjung dengan kebutuhan khusus.
3. Untuk memenuhi standar keberlanjutan budaya, destinasi Kepulauan Seribu sebaiknya selalu berusaha melindungi aset-aset dan artefak budaya, warisan tak berwujud, akses tradisional masyarakat lokal, dan hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu; mengatur kunjungan pada situs-situs budaya; dan menyediakan informasi yang penting mengenai situs-situs budaya.
4. Untuk memenuhi standar keberlanjutan lingkungan, destinasi Kepulauan Seribu sebaiknya selalu melindungi ekosistem, habitat, spesies lingkungan; membuat panduan perilaku bagi pengunjung; membatasi interaksi pengunjung dengan satwa liar; mencegah eksploitasi dan menjamin kesejahteraan hewan; menerapkan manajemen sumberdaya terkait konservasi energi, pengelolaan air, dan kualitas air; serta menerapkan manajemen limbah dan emisi terkait air limbah, limbah padat, transportasi, dan polusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Babbie, Earl R., 2010, The Practice of Social Research 12th Ed., Belmont: Wadsworth Cengage.

Bossel, Hartmut, 1999, Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications, Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.

Eber, Shirley (Ed.), 1992, Beyond the Green Horizon: A Discussion Paper Commissioned from Tourism Concern, Godalming, Surrey: WWF UK.

Krippendorf, Jost, 1989, The Holiday Makers: Understanding the Impact of Leisure and Travel, London: Heinemann.

Martin, William E. & Krista D. Bridgmon, 2012, Quantitative and Statistical Research Methods From Hypotesis to Results, San Fransico: Jossey-Bass

Modica, Patrizia & Muzaffer Uysal (Eds.), 2016, Sustainable Island Tourism Competitiveness and Quality of Life, Oxfordshire: CABI.

Modica, Patrizia, 2015, Sustainable Tourism Management and Monitoring. Destination, Business and Stakeholder Perspectives, Milan: Franco Angeli.

Murphy, P.E., 1985, Tourism: A Community Approach, New York: Methuen.

Weaver, David, 2006, Sustainable Tourism: Theory and Practice, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Artikel Jurnal

Arief, N. Nurlaela, Melia Famiola, M. Rahman Roestan, dan Zaki Zakaria, 2019, Evaluating Implementation of a CSR Program for Sustainable Tourism Development in Indonesia: A Case Study of Global Geopark Ciletuh, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure GCBSS Special Edition

Bramwell, B. and Lane, B., 1993, Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach, Journal of Sustainable Tourism Vol. 1 Issue 1

Hudelson, John, 2014, Sustainable Mountain Tourism: An Analysis of BosniaHerzegovina's Wine Tourism and its Future, SHS Web of Conferences Vol. 12

Sitepu, Edy Sahputra, 2019, Improving Tourism Destination Management Through Sustainable Tourism Development Model A Case Study on TSR, E-Journal of Tourism Vol. 6. No. 2

Website

https://beritapulauseribu.id/2019/12/19/tahun-2019-23-ribu-turis-asing-kunjungi-pulau-seribu

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190324/12/903512/kemenpar-kembangkan-pariwisata-berkelanjutan-bagi-millenials

https://kompas.id/baca/metro/2019/06/29/kepulauan-seribu-menuju-nol-sampah

https://metro.tempo.co/read/439327/pak-jokowi-ini-5-masalah-di-kepulauan-seribu/full&view=ok

https://pulauseribu.jakarta.go.id/profile-wilayah

https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-pelangi

https://www.antaranews.com/berita/927607/membenahi-wisata-jakarta-di-kepulauan

https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-macan
https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-putri
https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-sepa
https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-pantara
https://nusatour.co.id/paket-tour-pulau-royal
https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-pari
https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-tidung
https://pulauseributraveling.com/paket-wisata-pulau-pramuka/
https://travelpulauseribu.co.id/pulau-payung/

Kebijakan Publik

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Dokumen

UNDP, 2003, Human Development Reports.
World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future.
WTO, 1996, What Tourism Managers Need to Know: A Practical Guide to the Development and Use of Indicators of Sustainable Tourism.

LAMPIRAN 1
KUESIONER

Petunjuk:
Berilah tanda centang pada kolom yang disediakan.

No.	Pernyataan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
A1	a. Bukti dokumenter yang menunjukkan susunan dan tanggung-jawab kelompok yang relevan. b. Rencana keuangan dan anggaran yang menunjukkan sumber pendanaan saat ini dan masa depan. c. Bukti hubungan dan keterlibatan dengan badan-badan lain. d. Catatan staf permanen dan personel yang dikontrak, menunjukkan pengalaman yang relevan. e. Pedoman dan proses manajemen, yang menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam operasi dan pemberian kontrak		
A2	a. Dokumen diterbitkan yang menjelaskan strategi dan tindakan tujuan saat ini. b. Strategi/rencana terlihat jelas dan tersedia secara *online*. c. Bukti konsultasi pemangku kepentingan, pertemuan dll. dalam mengembangkan rencana. d. Referensi ke prinsip keberlanjutan dan penilaian aset, masalah dan risiko, yang terkandung dalam strategi dan rencana aksi.		

	e. Referensi khusus dalam strategi/rencana aksi untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas (termasuk mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan) dan sebaliknya.		
A3	a. Indikator dan target sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dapat diukur dan diidentifikasi. b. Pengukuran terhadap indikator-indikator ini, dengan hasil dicatat dan dipublikasikan setidaknya setiap tahun. c. Bukti tertulis dari *monitoring* dan pelaporan tindakan dan hasil. d. Tinjauan sebelumnya tentang sistem *monitoring* dan jadwal untuk tinjauan di masa depan.		
A4	a. Bukti komunikasi berkala tentang masalah keberlanjutan dengan bisnis terkait pariwisata (media, pertemuan, kontak langsung, dll.). b. Dukungan dan saran keberlanjutan untuk bisnis terkait pariwisata tersedia dan dipromosikan. c. Jumlah dan persentase bisnis yang disertifikasi berdasarkan standar keberlanjutan pariwisata dengan target untuk penjangkauan yang lebih luas. d. Bukti promosi skema sertifikasi. e. Daftar perusahaan bersertifikasi terkait pariwisata, terus diperbarui.		
A5	a. Bukti promosi dan fasilitasi partisipasi publik dalam perencanaan/manajemen destinasi. b. Informasi tentang jenis dan tingkat partisipasi tersebut. c. Survei penduduk dan mekanisme umpan balik sistematis lainnya,		

	yang mencakup masalah pariwisata. d. Bukti tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas umpan balik penduduk. e. Program informasi, pendidikan dan pelatihan pariwisata disediakan untuk penduduk.		
A6	a. Survei pengunjung (dan mekanisme umpan balik lainnya) dilakukan dan dilaporkan. b. Survei dan umpan balik mencakup reaksi pengunjung terhadap masalah keberlanjutan. c. Bukti tindakan yang diambil dalam menanggapi survei pengunjung/temuan umpan balik. d. Contoh informasi pengunjung yang mencakup masalah keberlanjutan dan bagaimana meresponsnya.		
A7	a. Informasi terkini dan materi promosi dengan konten yang sesuai. b. Ada proses untuk memeriksa keakuratan dan kesesuaian promosi dan informasi destinasi. c. Bukti konsultasi dengan komunitas lokal dan badan lingkungan dan budaya mengenai konten dan pengiriman komunikasi.		
A8	a. Strategi dan rencana aksi manajemen destinasi membahas musim dan penyebaran kunjungan. b. Variasi dalam volume pengunjung sepanjang tahun dimonitor, termasuk di lokasi yang paling banyak dikunjungi. c. Dampak volume dan kegiatan pengunjung diidentifikasi melalui pengamatan dan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan.		

	d. Tindakan diambil untuk mengelola arus dan dampak pengunjung. e. Strategi pemasaran dan pemilihan target pasar memperhitungkan pola kunjungan, dampak kegiatan dan kebutuhan destinasi.		
A9	a. Kebijakan/peraturan/pedoman khusus yang mengontrol pembangunan didokumentasikan dan diidentifikasi berdasarkan judul dan tanggal. b. Persyaratan penilaian dampak ditetapkan, mencakup dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, pada skala yang cukup untuk mengatasi masalah jangka panjang untuk tujuan. c. Peraturan khusus tentang penyewaan dan pengoperasian properti untuk pariwisata, dengan bukti penerapan dan penegakannya. d. Bukti partisipasi publik dalam pengembangan kebijakan/peraturan/pedoman. e. Bukti konsultasi dengan, dan persetujuan dari penduduk asli atau kelompok etnis minoritas ketika pengembangan pariwisata telah diusulkan atau telah terjadi di wilayah mereka. f. Bukti komunikasi dan penegakan kebijakan/peraturan/pedoman, pada tahap perencanaan, pengembangan dan implementasi.		
A10	a. Strategi dan rencana aksi manajemen destinasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah iklim. b. Peraturan, pedoman dan zonasi untuk pengembangan dan kegiatan pariwisata		

	mengakomodasi konsekuensi dari perubahan iklim. c. Penilaian risiko iklim, mencakup risiko saat ini dan masa depan dilakukan dan disediakan untuk publik. d. Bukti pertimbangan dampak dan kontribusi ekosistem lokal terhadap adaptasi perubahan iklim. e. Informasi tentang perubahan iklim yang telah tersedia untuk publik.		
A11	a. Pengurangan risiko yang terdokumentasi, manajemen krisis dan rencana tanggap darurat untuk pariwisata di destinasi. b. Rencana tersebut mengakui berbagai risiko, termasuk bencana alam, terorisme, kesehatan, penipisan sumber daya, dan lainnya yang sesuai dengan lokasi. c. Prosedur komunikasi diidentifikasi untuk digunakan selama dan setelah keadaan darurat. d. Program untuk penyampaian informasi dan pelatihan lokal tentang manajemen risiko dan krisis.		
B1	a. Program pengumpulan data ekonomi. b. Laporan tahunan tentang kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung dari pariwisata di destinasi. c. Data yang mencakup berbagai ukuran dampak ekonomi (mis. volume, pengeluaran, pekerjaan, investasi, dan penyebaran manfaat ekonomi di destinasi).		
B2	a. Penyediaan program/kursus pelatihan keterampilan yang relevan, tersedia secara lokal.		

	b. Pernyataan komitmen oleh perusahaan pariwisata untuk penyediaan pekerjaan/peluang karier yang layak. c. Peluang pelatihan dan pekerjaan dipromosikan dan diambil oleh orang-orang lokal, termasuk perempuan, kaum muda, kaum minoritas dan para penyandang cacat. d. Saluran untuk memeriksa kondisi kerja dan menerima/menangani keluhan (mis. keterlibatan serikat pekerja).		
B3	a. Saran, keuangan, atau dukungan lain tersedia di destinasi untuk UKM terkait pariwisata. b. Bantuan dengan akses pasar untuk UKM terkait pariwisata setempat. c. Tindakan untuk mendorong dan membantu perusahaan pariwisata setempat untuk membeli barang dan jasa secara lokal. d. Inisiatif untuk membantu petani lokal, pengrajin dan produsen makanan untuk terlibat dalam rantai nilai pariwisata. e. Produk dan kerajinan lokal diidentifikasi, dipromosikan, dan tersedia untuk dijual kepada pengunjung di destinasi.		
B4	a. Dukungan untuk komunitas lokal dan inisiatif keberlanjutan oleh perusahaan pariwisata lokal didorong dan difasilitasi. b. Ada skema, dan dipromosikan, bagi pengunjung untuk mendukung komunitas lokal dan inisiatif keberlanjutan. c. Kesukarelawanan dan keterlibatan dengan masyarakat tidak melibatkan intrusi atau eksploitasi.		

B5	a. Referensi (judul, tanggal) untuk hukum khusus yang berkenaan dengan destinasi tentang hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan. b. Bukti komunikasi dan penegakan hukum di atas dan praktik baik terkait (termasuk untuk perusahaan pariwisata dan pengunjung). c. Analisis risiko dan dampak terkait hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, perbudakan modern dan pekerja anak dilakukan secara teratur. d. Destinasi dan pemain pariwisata utama adalah penandatanganan Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata.		
B6	a. Referensi (judul, tanggal) untuk hukum khusus yang berkaitan dengan destinasi terkait hak properti dan akuisisi serta hak pengguna dan akses ke sumber daya. b. Referensi dalam hukum di atas untuk hak-hak komunal dan pribumi, konsultasi publik dan pemukiman kembali. c. Bukti penegakan hukum di atas dalam konteks pengembangan dan kegiatan pariwisata. d. Bukti konsultasi masyarakat, persetujuan dan kompensasi		
B7	a. Layanan keamanan dan kesehatan dibangun dengan baik dan aktif di destinasi b. Kebutuhan pengunjung diidentifikasi dan ditangani dalam pemberian layanan keamanan dan kesehatan. c. Fasilitas pariwisata diperiksa untuk memenuhi standar keselamatan dan kebersihan.		

B8	a. Adanya peraturan dan standar mengenai aksesibilitas tempat, fasilitas dan layanan pengunjung. b. Penerapan standar aksesibilitas yang konsisten di fasilitas publik. c. Data tentang tingkat/proporsi tempat dan fasilitas pengunjung yang dapat diakses. d. Bukti program untuk meningkatkan akses bagi orang-orang dengan berbagai kebutuhan akses. e. Informasi tentang aksesibilitas termasuk dalam komunikasi tentang destinasi secara keseluruhan. f. Rincian aksesibilitas termasuk dalam informasi pengunjung tentang tempat-tempat utama.		
C1	a. Daftar aset budaya, termasuk evaluasi dan indikasi kerentanan. b. Program rehabilitasi dan konservasi aset. c. Mekanisme untuk menggunakan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset budaya.		
C2	a. Referensi ke hukum yang relevan yang berkaitan dengan artefak sejarah tentang destinasi (judul, tanggal). b. Bukti komunikasi hukum yang relevan dengan perusahaan pariwisata dan pengunjung. c. Bukti penegakan hukum yang relevan.		
C3	a. Identifikasi dan daftar warisan budaya tak berwujud. b. Contoh perayaan dan pengalaman pengunjung dari warisan budaya tak berwujud (acara, produk khas, dll.). c. Bukti keterlibatan masyarakat lokal dan pribumi dalam mengembangkan dan memberikan pengalaman		

	pengunjung berdasarkan warisan budaya tak berwujud. d. Umpan balik dari pengunjung dan komunitas lokal tentang pengiriman pengalaman warisan tak berwujud.		
C4	a. Pemantauan aksesibilitas ke situs alam dan budaya untuk masyarakat lokal. b. Bukti keterlibatan dengan komunitas lokal mengenai akses tradisional. c. Tindakan khusus untuk melindungi dan/atau merehabilitasi akses masyarakat lokal.		
C5	a. Rujukan ke hukum tentang kekayaan intelektual tentang destinasi (judul, tanggal). b. Komunikasi hak kekayaan intelektual kepada para pemangku kepentingan pariwisata. c. Bukti bahwa hak kekayaan intelektual dilindungi dalam pengembangan pengalaman budaya bagi pengunjung.		
C6	a. *Monitoring* arus pengunjung dan dampak pada situs budaya, dengan hasilnya dibagikan di seluruh destinasi. b. Bukti tindakan untuk mengelola dampak terkait pariwisata di atau sekitar situs budaya. c. Keberadaan dan distribusi pedoman yang diterbitkan tentang perilaku pengunjung di situs sensitif dan acara budaya serta *monitoring* kepatuhan secara berkala. d. Kode praktik untuk operator tur dan pemandu wisata dan/ atau keterlibatan mereka lainnya dalam manajemen pengunjung di situs budaya.		

	e. Penyediaan pelatihan untuk panduan.		
C7	a. Penyediaan bahan interpretatif informatif di situs dan dalam format yang dapat diakses sebelum kedatangan. b. Bukti bahwa bahan interpretatif telah diteliti dengan baik dan akurat. c. Bahan interpretasi yang mengidentifikasi signifikansi dan sensitivitas/kerapuhan situs. d. Bukti kolaborasi komunitas tuan rumah dalam persiapan bahan interpretatif yang relevan. e. Bahan interpretatif tersedia dalam bahasa yang relevan.		
D1	a. Daftar situs dan aset warisan alam, yang menunjukkan jenis, status konservasi dan kerentanan. b. Program untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan alam. c. Program untuk memberantas dan mengendalikan spesies invasif. d. Tindakan untuk mengidentifikasi, memantau dan memitigasi dampak pariwisata terhadap keanekaragaman hayati dan warisan alam. e. Mekanisme untuk menggunakan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset alam. f. Komunikasi dengan pengunjung dan perusahaan untuk mengurangi penyebaran spesies asing.		
D2	a. *Monitoring* arus pengunjung dan dampak pada situs alami, dengan hasil dibagikan di seluruh tujuan. b. Bukti tindakan untuk mengelola dan mengurangi dampak terkait pariwisata di atau sekitar situs alam.		

	c. Keberadaan dan distribusi pedoman yang diterbitkan tentang perilaku pengunjung di situs sensitif, dan *monitoring* kepatuhan secara berkala. d. Kode praktik untuk operator tur dan pemandu wisata dan/atau keterlibatan lainnya dengan mereka tentang manajemen pengunjung di situs alami. e. Kerjasama dengan badan konservasi lokal untuk mengidentifikasi risiko lingkungan yang terkait dengan pariwisata dan langkah-langkah untuk menguranginya. f. Penyediaan pelatihan untuk panduan.		
D3	a. Referensi (judul, tanggal) untuk hukum internasional, nasional dan lokal yang berlaku di destinasi mengenai interaksi dengan satwa liar. b. Pengesahan standar internasional pengamatan satwa liar untuk spesies laut dan darat. c. Distribusi kode praktik interaksi satwa liar, termasuk pengamatan, yang mencerminkan standar internasional. d. Sistem untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, dan kode praktik di antara operasi pariwisata. e. Tindakan untuk memonitor kesejahteraan satwa liar dan meminimalkan gangguan, di lokasi di mana terjadi interaksi. f. Penyediaan informasi kepada pengunjung tentang interaksi satwa liar yang berbahaya, seperti menyentuh dan memberi makan.		
D4	a. Referensi (judul, tanggal) hukum internasional, nasional dan lokal tertentu, standar dan pedoman		

	yang berlaku di tujuan mengenai kesejahteraan hewan dan konservasi spesies. b. Pemberitahuan hukum, standar dan pedoman untuk perusahaan pariwisata dan panduan. c. Sistem inspeksi kondisi satwa liar dan hewan peliharaan yang ditangkap, termasuk tempat tinggal dan penanganannya. d. Perizinan dan pengecekan kualifikasi personel yang bertanggung jawab atas satwa liar yang ditangkap. e. Tindakan untuk mempromosikan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) di sektor pariwisata dan untuk memastikan kepatuhan terhadapnya. f. Pemberian informasi kepada pengunjung tentang menghindari perdagangan spesies yang terancam punah, mis. dalam pembelian suvenir yang berasal dari spesies satwa liar yang terancam yang dilaporkan oleh IUCN atau CITES. g. Penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perburuan adalah bagian dari pendekatan konservasi, berbasis ilmiah, dan ditegakkan dengan ketat.		
D5	a. Target konsumsi energi dipublikasikan dan dipromosikan. b. Program untuk meningkatkan efisiensi energi mis. mempromosikan dan mendukung penyekatan. c. Investasi dalam energi terbarukan dan persen dari total penyediaan/konsumsi. d. Dukungan dan insentif untuk pemantauan dan pengurangan energi oleh perusahaan		

D6	a. Penyediaan panduan dan dukungan untuk *monitoring* dan pengurangan penggunaan air oleh perusahaan. b. Program untuk secara teratur menilai risiko air. c. Pengaturan, publikasi dan penegakan tujuan pelayanan air, ketika risiko air telah dinilai tinggi. d. *Monitoring* dan pengendalian sumber dan volume air yang digunakan untuk tujuan pariwisata dan pengaruhnya terhadap masyarakat lokal dan ekosistem. e. Promosi dan pengecekan kepatuhan terhadap tujuan oleh perusahaan pariwisata. f. Informasi pengunjung tentang risiko air dan meminimalkan penggunaan air		
D7	a. Program *monitoring* kualitas air. b. Adanya data dan laporan tentang kualitas air. c. *Monitoring* air mandi, dengan sertifikasi dan identifikasi situs-situs yang mencapai standar yang ditetapkan. d. Bukti tindakan untuk meningkatkan kualitas air. e. Informasi bagi pengunjung tentang kualitas air minum lokal, untuk mendorong penggunaan sebagai alternatif air kemasan.		
D8	a. Pedoman dan peraturan tertulis tentang pengolahan air limbah. b. Sistem pedoman penegakan di antara perusahaan. c. *Monitoring*/pengujian air limbah yang dikeluarkan. d. Penyediaan sistem pengolahan air kota yang berkelanjutan, untuk digunakan oleh sektor pariwisata, yang praktis dan sesuai.		

D9	a. Program *monitoring* limbah, dengan hasil dan target diterbitkan. b. Kampanye/saran/dukungan terkoordinasi dengan perusahaan pariwisata dalam manajemen limbah, termasuk limbah makanan. c. Kampanye untuk mengurangi/menghilangkan item sekali pakai, terutama plastik. d. Program manajemen limbah untuk kantor dan fasilitas publik. e. Penyediaan sistem pengumpulan dan daur ulang, dengan setidaknya empat aliran (yaitu organik, kertas, logam, gelas dan plastik). f. Penyediaan sistem berkelanjutan untuk pembuangan limbah sisa. g. Kampanye untuk menghilangkan menjatuhkan sampah, termasuk oleh pengunjung, dan untuk menjaga ruang publik tetap bersih. h. Tempat sampah yang memadai untuk pembuangan limbah terpisah.		
D10	a. Target yang dipublikasikan untuk persentase pengurangan emisi berdasarkan tanggal yang ditentukan. b. Laporan iklim tahunan, termasuk *monitoring* dan tindakan mitigasi. c. Kampanye yang didukung atau keterlibatan lain dengan perusahaan pariwisata mengenai pengurangan dan mitigasi emisi. d. Tindakan untuk mengurangi emisi dari operasi sektor publik. e. Informasi untuk perusahaan dan pengunjung tentang skema ganti rugi yang memenuhi standar yang diakui.		
D11	a. Investasi dalam infrastruktur transportasi yang lebih		

	berkelanjutan, termasuk transportasi umum dan kendaraan rendah emisi. b. Informasi dipromosikan kepada pengunjung tentang opsi transportasi alternatif ke dan dalam tujuan c. Data tentang pengunjung menggunakan moda transportasi alternatif. d. Peningkatan dan promosi peluang bersepeda dan berjalan kaki. e. Prioritas pasar pengunjung dapat diakses dengan opsi transportasi pendek dan lebih berkelanjutan. f. Sektor publik dan perusahaan pariwisata memprioritaskan transportasi berdampak rendah dalam operasinya.		
D12	a. Pedoman polusi cahaya dan suara diproduksi dan dipromosikan ke perusahaan pariwisata. b. Identifikasi dan *monitoring* sumber potensial polusi cahaya dan suara terkait dengan pariwisata. c. Mekanisme untuk memungkinkan penghuni melaporkan polusi cahaya dan suara, dengan tindak lanjut.		

LAMPIRAN 2
SKOR JAWABAN RESPONDEN

No.		Responden																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A1	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	a	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A5	a	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
	c	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
	d	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	e	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
A6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	a	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	b	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
	c	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
A8	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	a	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.		Responden														
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
A1	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	a	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	a	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	a	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
	b	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	c	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	d	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	e	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
A6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
A8	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	a	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

No.		Responden															
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
A1	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	a	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	a	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
	c	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A8	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B2	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.		Responden																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B3	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
	e	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
B4	a	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
B8	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	a	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
C7	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden														
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
B3	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
B4	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
B5	a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
C2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	a	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C7	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden															
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
B3	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
B4	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	a	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	a	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
C4	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
C6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C7	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
D1	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D7	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D8	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D9	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	h	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D10	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D11	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden														
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
D2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D7	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D8	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D9	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	h	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D10	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D11	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden															
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
D2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0
D4	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D6	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D7	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D8	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D9	a	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	h	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D10	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D11	a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D12	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden														
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
D12	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.		Responden														
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
D12	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0